

PEMBERDAYAAN MENUJU MASYARAKAT SIAGA BENCANA MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)

(Studi Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Oleh :

KHOIRUL IKHWAN

NIM. 115030613111001



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2018

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Alam Nasyroh: 5)

“Jauh Lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan”

(Yasa Singgih)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **PEMBERDAYAAN MENUJU MASYARAKAT SIAGA
BENCANA MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) (STUDI DI DESA
SITIJARJO KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
KABUPATEN MALANG)**

Disusun oleh : Khoirul Ikhwan

NIM : 1150306113111001

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Minat : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Malang, 6 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dr. Ainul Hayat, SPd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 12.00 – 1.00 WIB
Skripsi atas nama : Khoirul Ikhwan
Judul : Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tanggu (PDPT) (Studi di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dr. Ainul Hayat, SPd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1001

Anggota



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP, Ph.D
NIP. 2011078312041000

Anggota



Rispa Ngindana, S.AP, M.AP
NIK. 20140586110612000

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 atau pasal 70.

Malang, 6 Juli 2018

Mahasiswa



Khoirul Ikhwan

NIM. 115030613111001

RINGKASAN

Khoirul Ikhwan, 2018, Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) (Studi di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) Drs. Heru Ribawanto, MS Dr. Ainul Hayat, SPd, M.Si

Daerah pesisir merupakan daerah rawan bencana terutama bencana banjir akibat meluapnya air laut. Salah satu daerah yang rawan bencana yaitu Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya menangani masalah tersebut melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Program menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pesisir, yang salah satu tujuannya membentuk masyarakat siaga bencana.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan tentang strategi pemberdayaan yang meliputi : 1. Motivasi; 2. Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan; 3. Mobilisasi Sumberdaya; 4. Pengembangan Jejaring, serta; 5. Faktor Penghambat pemberdayaan masyarakat siaga bencana. Penelitian ini dilakukan pada Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari jenis yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model 3 proses analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini adalah tim pendamping dan pemerintah desa mampu menumbuhkan motivasi masyarakat tentang siaga bencana walau dengan keadaan mendesak, pembangunan fasilitas siaga bencana bagus tapi tidak diiringi dengan pelatihan, kelompok masyarakat dibentuk untuk membuat usulan dan mengelola dana secara mandiri, masyarakat mampu berkoordinasi dengan tiap kelompok untuk melakukan kegiatan. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat siaga bencana adalah tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dan tidak sinkronnya usulan dari bawah ke atas.

Kata Kunci : Pemberdayaan, siaga bencana, kelompok Masyarakat

SUMMARY

Khoirul Ikhwan, 2018, Empowerment Towards Disaster Prepared Communities Through Coastal Rural Development Program (PDPT) (Study in the Village Sitiarjo District Sumbermanjing Wetan Malang Regency) Drs. Heru Ribawanto, MS Ainul Hayat, SPd, M.Si

Coastal areas are prone to disasters, especially floods due to overflow of sea water. One of the areas that are vulnerable disaster Sitiarjo Village Sumbermanjing Wetan Malang Regency. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to make efforts to handle the problem through the Tangguh Coastal Village Development Program through the Office of Marine and Fisheries Malang Regency. The program emphasizes community empowerment by forming a Coastal Communities Group, one of its objectives of forming a disaster prepared community.

The purpose of this research is to describe, analyze, and conclude about empowerment strategy which include: 1. Motivation; 2. Awareness raising and skills training; 3. Resource Mobilization; 4. Networking Development, and; 5. Factors inhibiting community empowerment for disaster preparedness. This research was conducted at Sitiarjo Village, Sumbermanjing Wetan Sub District, Malang Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach with data collection techniques consist of types of interviews, field observation, and documentation. While the technique of data analysis using model 3 process analysis of Miles and Huberman.

The results of this research are team of assistant and village government able to grow community motivation about disaster alert despite urgent situation, construction of disaster alert facility is good but not accompanied by training, community group is developed to make proposal and manage fund independently, community can coordinate with each group to conduct activities. The inhibiting factor of community empowerment for disaster preparedness is the level of public awareness that is lacking and the synchronization of proposals from the bottom up.

Keywords: Empowerment, disaster alert, Community groups

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) (Studi di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Bambang Supriyono MS selaku Dekan Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS dan Bapak Dr. Ainul Hayat, SPd, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Budi Rianto, S.Pi selaku Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Malang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ami Ratunnisa, S.Pi selaku staf Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Malang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Pon Lidah, S.Pi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat Pesisir melalui Program PDPT Malang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Enggar selaku Ketua KMP GAT Desa Sitiarjo yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Buang dan Muriyani yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh demi kelancaran skripsi ini.
9. Kakak perempuan saya Almh Yulianti dan adik Kembar saya Khoirul Arifin yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh demi kelancaran skripsi ini.
10. Sahabat dan teman saya Naufal Gusti, Yonief Fadli, M. Rifki, Kiki Retno, Mardana, Adi, Jihad, Nanda, Adit, Yuris, Tyas Pratiwi yang selalu memberikan dukungan serta menemani selama penulisan skripsi.
11. Keluarga Devplan angkatan 2011 dan semua pihak yang telah semangat serta membantu penulis dalam menulis skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang 8 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN ..	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan.....	12
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	12
2. Perencanaan Pembangunan	13
B. Pemberdayaan Masyarakat	15
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	17
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	21
C. Manajemen Bencana	22
1. Mitigasi Bencana	23
2. Kewaspadaan.....	24
3. Tanggap Darurat.....	25
4. Sesudah/Pemulihan	26
D. Pengembangan Desa.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi dan Situs Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum	39
1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.....	39
2. Gambaran Umum Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang	41
B. Penyajian Data	50
1. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)	50
a. Motivasi.....	50
b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan KemampuanFokus	54
c. Mobilisasi Sumberdaya.....	59
d. Pembangunan dan Pengembangan	61
2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir TangguhProsest.....	62
C. Pembahasana	62
1. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)	62
a. Motivasi	62
b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan KemampuanFokus	65
c. Mobilisasi Sumberdaya.....	67
d. Pembangunan dan Pengembangan	69
2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir TangguhProsest.....	72
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	80

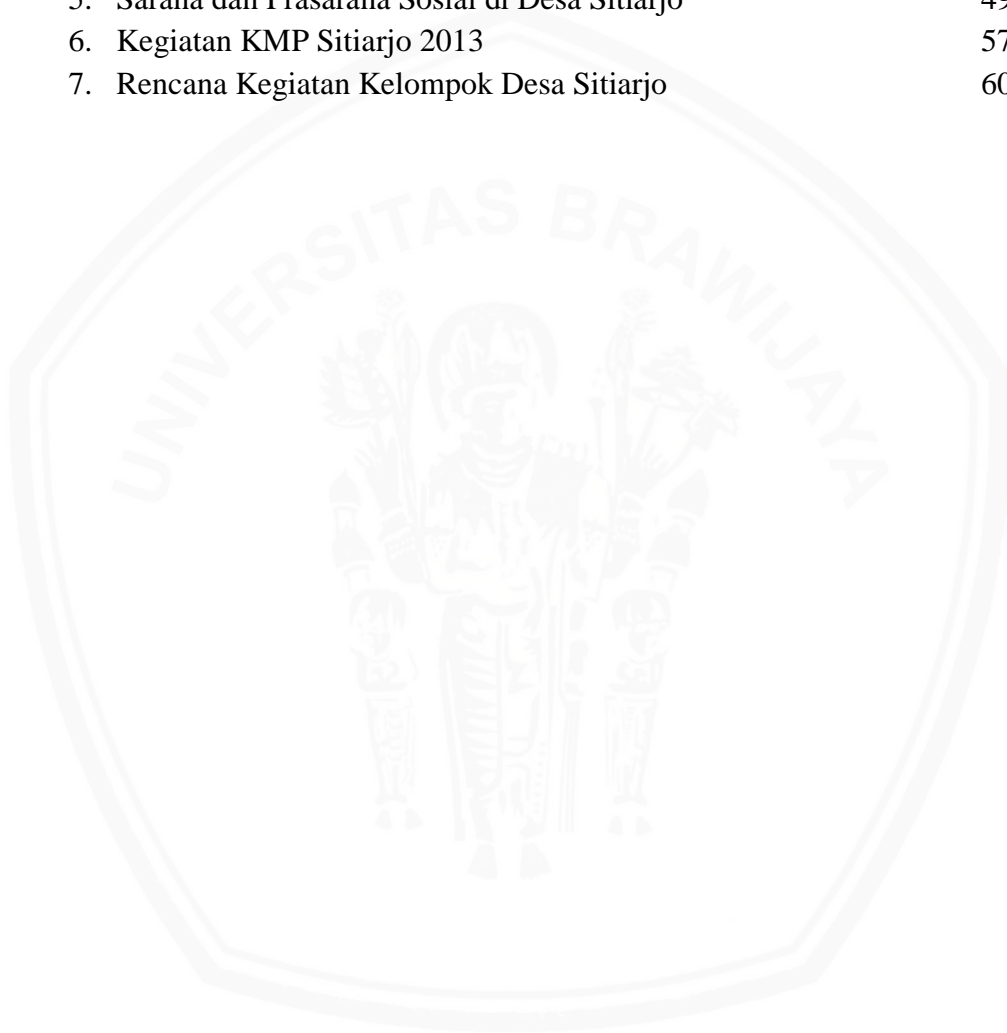
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	<i>Qualitative data analysis</i> Miles, Huberman, and Saldana	38
2.	Peta Administrasi lokasi Desa Sitarjo	43
3.	Tahapan pelaksanaan PDPT	51
4.	Pembuatan Jalur Evakuasi Banjir Desa Sitarjo	54
5.	Pembuatan Pos Pantau Pasang Surut air di muara	54



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	45
2.	Sebaran Penduduk Berdasarkan RT-RW Desa Sitarjo	45
3.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitarjo	46
4.	Mata Pencaharian Penduduk di Bidang Jasa/ Perdagangan	47
5.	Sarana dan Prasarana Sosial di Desa Sitarjo	49
6.	Kegiatan KMP Sitarjo 2013	57
7.	Rencana Kegiatan Kelompok Desa Sitarjo	60



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	<i>Interview guide</i>	80
2.	Surat Ijin Penelitian	81
3.	Pedoman Pelaksanaan Pogram PDPT 2014	82
4.	<i>Curriculum vitae</i>	145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di seluruh bagian bumi manapun manusia akan berhadapan dengan suatu fenomena yang dapat mengakibatkan bencana. Bencana selalu datang tanpa disadari, namun dapat berdampak luas terhadap semua aspek yang ada di sekitarnya. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Jika dilihat secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Australia, Benua Asia, Samudera Pasifik dan Lempeng Samudera Hindia. Selain itu di sebelah timur dan selatan Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera kemudian Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan berakhir di Sulawesi, dimana sisi dari pegunungan ini merupakan pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian besar didominasi oleh rawa-rawa (RAN PB, 2006).

Dengan karakteristik seperti ini, Indonesia memiliki potensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Indonesia, sebagai negara maritim, sangat merasakan dampak yang ditimbulkan bencana, terutama gempa bumi yang disebabkan berbenturannya dua lempeng di dasar laut. Meskipun Negara Kepulauan dengan Sumberdaya kelautan yang besar, sebenarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik untuk

meningkatkan kesejahteraan bangsa (Rudianto, 2004:1). Pengelolaan kawasan pesisir yang belum sempurna mengakibatkan dampak yang ditimbulkan setiap bencana cukup luas.

Wilayah peisisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001).

Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*main hazard potency*) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain. Disamping tingginya potensi bahaya utama, Indonesia juga memiliki potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*). Potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan, persentase bangunan kayu (utamanya di daerah pemukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi (Kausar, 2008: 795).

Peningkatan jumlah penduduk yang hidup di wilayah pesisir memberikan dampak tekanan terhadap sumberdaya alam pesisir seperti degradasi pesisir, hutan

mangrove, terumbu karang, pembuangan limbah ke laut, sedimentasi sungai-sungai, erosi pantai, abrasi dan sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir yang diikuti dengan berbagai peristiwa dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini seperti fenomena anomali cuaca, angin ribut, banjir, naiknya permukaan laut, dan lain-lain menyebabkan wilayah pesisir menjadi rawan terhadap bencana (Anonim, 2012: 1). Kondisi tersebut menuntut adanya upaya deteksi, mitigasi sampai pencegahan dan penanganan bencana sebaik mungkin.

Banyak yang bisa diangkat sebagai satu contoh kongkrit kerusakan wilayah pesisir yang bisa mengakibatkan dampak luas ketika bencana datang. Sebut saja peralihan fungsi lahan bakau menjadi lahan tambak maupun penggalian pasir laut secara brutal yang mengakibatkan meluasnya cakupan ombak laut ke bibir pantai. Semuanya akan berujung pada kerusakan wilayah pesisir. Jika tidak ditangani lebih serius, bukan tidak mungkin ekosistem yang berada di wilayah pesisir beranjak menuju kepunahan dalam kurun waktu mendatang (Anonim, 2012: 2-3). Beberapa tahun terakhir, fenomena alam berupa air pasang yang menghantam pemukiman penduduk pesisir dan terjadinya air rob yang menggenangi kawasan lain sering terjadi. Jika mau disadari, kejadian-kejadian tersebut merupakan dampak tindakan yang salah dalam memperlakukan wilayah pesisir. Bencana itu menjadi rutinitas tahunan sejalan dengan perubahan iklim yang cukup signifikan. Setidaknya, rentetan kejadian tadi memberikan garis merah untuk ditanggulangi. Salah satu cara meminimalkan dampak kerusakan akibat bencana tersebut dengan menyiapkan siaga bencana di wilayah pesisir.

Untuk menghindari kerugian yang timbul akibat bencana perlu adanya kesadaran seluruh komponen bangsa terutama pemerintah agar suatu kejadian bahaya tidak menyebabkan bencana bagi warganya. Seperti yang diungkapkan oleh Priambodo (2009: 15) bahwa:

Timbulnya kerugian baik fisik maupun non fisik terutama korban jiwa sering kali disebabkan oleh ketidaksengajaan dalam menghadapi bencana, baik secara individu maupun kelompok. Guna meminimalkan hal tersebut, diperlukan sistem yang efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Sistem tersebut adalah sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bagi setiap individu, kelompok, maupun bangsa secara keseluruhan.

Sistem tanggap bencana atau manajemen bencana (disaster management) adalah sebuah pendekatan yang sistematis dan sinergis dari berbagai pihak dalam mengantisipasi dan atau menangani suatu bencana (Hasniati, 2008: 831). Sistem tanggap bencana merupakan penanganan bencana secara menyeluruh mulai tahap pra bencana, pada saat bencana, hingga pasca bencana. Selama ini penanganan bencana pada tahap pra bencana terutama terkait kebijakan mitigasi bencana terkesan tidak tersentuh.

Adanya mitigasi bencana merupakan langkah preventif untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan. Mitigasi bencana merupakan bagian dari tanggap bencana yang dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu berupa korban jiwa atau harta benda yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Kebijakan mitigasi dalam manajemen bencana ini adalah sebuah kebijakan yang bersifat jangka panjang, yang dapat bersifat struktural maupun non struktural (Susanto, 2008:909).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 11.884 desa tepi laut di 2.118 Kecamatan Pesisir, dari 497 terdapat 318 (64%) Kabupaten/Kota diantaranya berada di wilayah pesisir (Kelautan dan Perikanan dalam angka, 2013:76).

Desa pesisir Indonesia memiliki beberapa masalah pokok yang menjadi kendala dalam pemanfaatan potensi sumber daya pesisir. Masalah pokok tersebut adalah 1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); 2) tingginya kerusakan sumber daya pesisir; 3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan luntturnya nilai-nilai budaya lokal; dan 4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir. (pdpt-kkp.org: 2013)

Atas dasar masalah-masalah pokok desa pesisir di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menginisiasi adanya kegiatan yang mampu mendorong pengembangan desa pesisir di Indonesia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yaitu Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Dalam Permen KP No. 2 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikan, yang dimaksud PDPT adalah bagian dari PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim (Pedoman Teknis PDPT, 2014: 5-9).

Fokus pengembangan PDPT adalah pada lima bina, salah satunya adalah bina siaga bencana atau perubahan iklim. Bina siaga bencana merupakan kegiatan yang mencakup pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim

melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana penanggulangan bencana yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir (Pedoman Teknis PDPT, 2014: 16). Diharapkan dengan adanya program PDPT bina siaga bencana atau perubahan iklim, masyarakat akan lebih sadar mengenai bahaya bencana di wilayah pesisir serta mempunyai kesiapsiagaan ketika bencana terjadi sehingga meminimalisir dampak bencana.

Penetapan lokasi kegiatan PDPT dilatarbelakangi dengan memenuhi sekurang-kurangnya tiga kriteria dari enam kriteria yang ada.

Kriteria penatapan lokasi tersebut adalah 1) lokasi rawan bencana dan perubahan iklim, 2) mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan, 3) Masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya, 4) Kondisi lingkungan permukiman kumuh, 5) Terjadi degradasi lingkungan pesisir, 6) tingkat pelayanan dasar rendah (pdpt-kkp.org: 2013).

Kabupaten Malang memiliki panjang pantai kurang lebih 85,92 km melintas enam kecamatan yaitu Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur dan Donomulyo. Adapun untuk wilayah Kabupaten Malang Program PDPT ditempatkan di 3 Desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yaitu Desa Tambakrejo, Desa Sitiarjo dan Desa Sidoasri, dengan berbagai bentuk kegiatan yang meliputi, Bina Siaga Bencana, Bina Lingkungan dan infrastruktur, maupun bina sumberdaya yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa (kelautan.malangkab.go.id, 2013).

Salah satu desa di Kabupaten Malang yang menjadi lokasi program PDPT adalah desa Sitiarjo. Pesisir desa Sitiarjo merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Penduduk yang bermukim di pesisir berjumlah 40 kk. Mereka

tinggal menyebar dari pinggir pantai sampai pedalaman. Masyarakat yang bermukim di sempadan pantai sangat rentan pada bencana tsunami. Desa Sitarjo merupakan desa yang sangat rentan pada bencana (banjir) dan perubahan iklim. Topografi desa yang berada di lembah membuat desa ini sangat rentan pada banjir. Sebagai desa yang ekonominya bertumpu pada pertanian keberadaan hujan sangat penting. Keberadaan tanggul yang rusak menyebabkan sawah-sawah banyak yang tidak teraliri air irigasi (Profil Desa Sitarjo, 2013: 31-32)

Keberadaan PDPT dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan desa pesisir diharapkan mampu menjawab kendala penanggulangan bencana sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya pesisir. Pengelolaan potensi sumberdaya di Desa Sitarjo masih belum optimal terkendala beberapa masalah yang telah disebutkan di atas. Desa Sitarjo ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagai lokasi program PDPT. Sesuai dengan kriteria yang ada diharapkan dengan adanya PDPT di Desa Sitarjo, pemanfaatan potensi sumberdaya menjadi lebih optimal, kapasitas kelembagaan dalam partisipasi masyarakat meningkat, dan memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi. Serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.

Keberadaan program PDPT di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana dengan judul **“PEMBERDAYAAN MENUJU MASYARAKAT SIAGA BENCANA MELALUI PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)” (Studi Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang.

2. Mengetahui dan mendiskripkan faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Menjadi bahan refensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama berkenaan dengan pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang.

2. Aspek Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi akademis tentang studi pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana di wilayah pesisir.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi bahan studi dalam melakukan penelitian, dalam bidang ilmu administrasi publik, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat siaga bencana.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas ini membahas latar belakang penelitian berkenaan dengan pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana di wilayah pesisir melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sebagai upaya mengembangkan desa pesisir. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan teliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat landasan pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan di lapangan baik data sekunder maupun primer.

BAB III METODE PENELITIAN

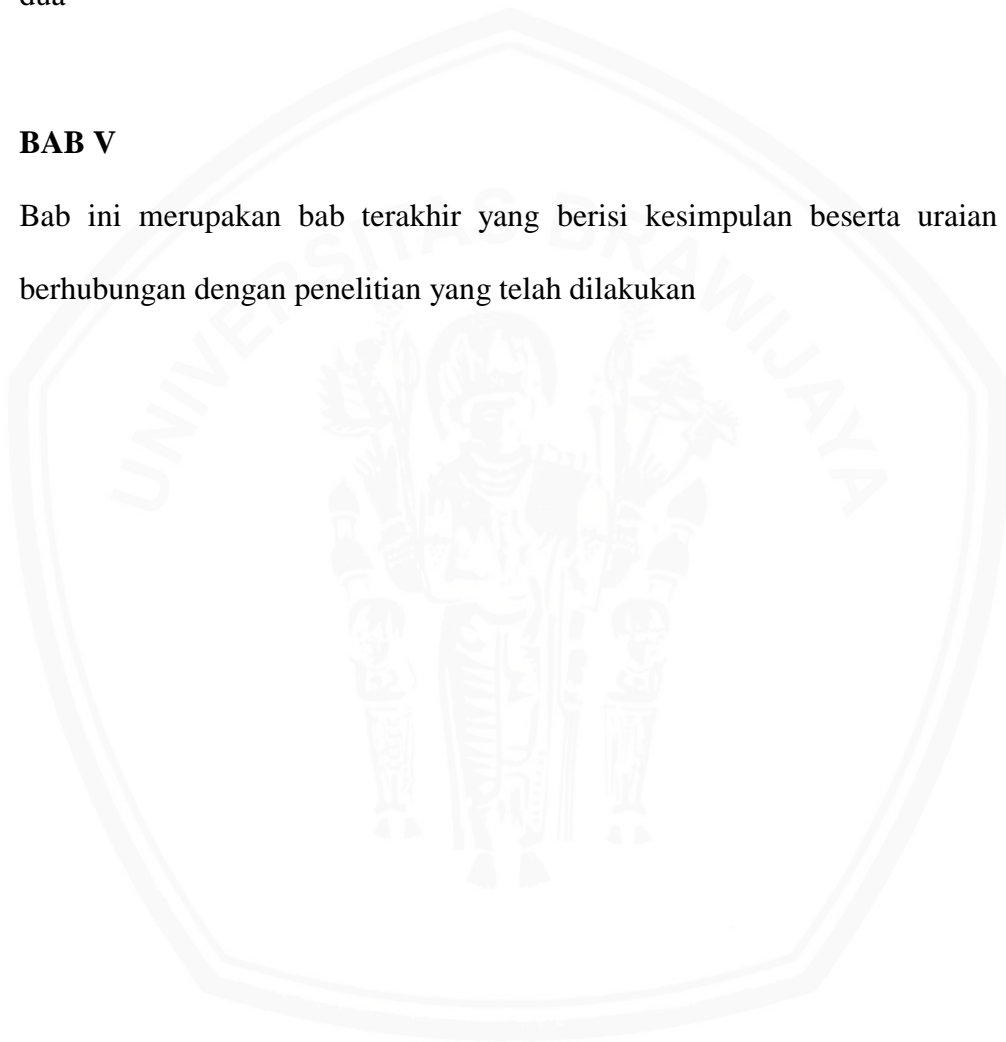
Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, fokus penelitian ditetapkan pada pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT dan meliputi faktor-faktor penghambatnya). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data serta keabsahan data.

BAB IV

Bab ini berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh wawancara, dokumen dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis dan dipaparkan dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua

BAB V

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan beserta uraian yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mempunyai dua pengertian menurut Siagian dalam buku “administrasi pembangunan” (2001:2) yang pertama administrasi adalah keseluruhan proses perencanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan pengertian dalam pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan pengertian tersebut definisi tentang pembangunan mempunyai artian yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman seseorang. Dengan demikian harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sangatlah penting dan menentukan. Meskipun peran pemerintah itu sangat penting, maka seluruh unsur masyarakat harus turut dalam pembangunan seperti pengertian administrasi pembangunan. Menurut Siagian (2001:4) : “Administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas pengertian administrasi pembangunan jelas bahwa bangsa yang sedang membangun tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang umum dan pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap masyarakat.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4).

The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar

efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta

3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005: 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai:

Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang baik.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Conyers dan Hills sebagaimana dikutip oleh Munir (2002:25) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

pada masa yang akan datang. Sedangkan Pengertian perencanaan pembangunan menurut Soekarwati (1990: 78) adalah

Suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sebegitu rupa dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditentukan untuk masa mendatang. Salah satu unsur yang menarik dalam pengertian ini adalah bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses yang menyeluruh yang berarti bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai bidang juga melibatkan banyak unsur bukan hanya dalam pemerintahan saja melainkan juga unsur-unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat.

Meski terdapat keragaman pengertian yang disampaikan tentang perencanaan pembangunan, namun dari berbagai pengertian tentang perencanaan tersebut dapat diambil beberapa unsur pokok yang terdapat dalam tiap pengertian dan membantu dalam memahami perencanaan pembangunan, yaitu bahwa perencanaan pembangunan merupakan;

1. Proses yang dilakukan oleh banyak pelaku namun yang terutama adalah pemerintahan atau badan resmi yang tugas pokoknya adalah menyusun perencanaan.
2. Pemilihan dari berbagai alternatif tindakan maupun sumber daya yang ada dan dimiliki untuk membiayai atau sebagai modal dalam menjalankan tindakan yang dipilih.
3. Alat mencapai tujuan yang berarti bahwa dalam suatu perencanaan termuat tujuan atau sasaran yang akan membantu mancapai kondisi yang diinginkan dan bagaimana mencapai tujuan atas sasaran tersebut.
4. Suatu perspektif waktu masa depan.

5. Skala prioritas yang menentukan tingkat kepentingan atau urgensi dari suatu tujuan yang lebih mendesak untuk dicapai.

B. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan suatu proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Menurut Shardlow (1998) yang dikutip oleh Rukmianto Adi (2008:78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

2. Strategi Pemberdayaan

Strategi dalam melakukan pemberdayaan memiliki beberapa aspek-aspek yang penting, seperti yang dikemukakan oleh Suharto (1997) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2012:170) bahwa ada lima strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di

desa atau di kelurahan. Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Sardiman 2006:73) motif merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Definisi Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Hamalik, 1992:173). Dalam Sardiman (2006:73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “felling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman yang dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001) mengemukakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan akan banyak ditentukan oleh individu-individu dalam menjalankan tugas yang diemban, sebab manusia merupakan pelaksana kegiatan dalam pencapaian tujuan. Bar-On (2000), mengemukakan kesadaran diri emosional adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengetahui penyebabnya.

3. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.

4. Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin

Sedangkan menurut Ismawan yang dikutip oleh Priyono (1996) yang dikutip oleh Mardikato dan Soebianto (2012: 170) menetapkan lima program strategi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

1. Pengembangan sumberdaya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok

3. Pemupukan modal masyarakat
4. Pengembangan usia produktif
5. Penyediaan informasi tepat guna

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, menurut Hutomo (2000 7-10) yaitu:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tidak berdaya adalah pemodalan. Tidak adanya modal membuat masyarakat tidak mampu berbuat untuk diri sendiri dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan.

2. Bantuan pengembangan Prasarana

Usaha mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah dalam melakukan aktifitas.

3. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting, tugas utama pendamping adalah memfasilitasi prose belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

4. Kelembagaan

Keberdayaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain itu mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam akses-akses yang diinginkan seperti pemodalan, media musyawarah, dan sebagainya.

3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pesisir dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*). Mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis (kusrini, 2008: 30)

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. Pertama, model pemberdayaan pesisir berbasis gender. Kedua, model pemberdayaan masyarakat berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. Kedua model juga bisa disinergikan. Pilihan terhadap salah satu model tersebut dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan

banyak dipengaruhi oleh tujuan pemberdayaan, unsur-unsur yang terlibat, dan kondisi-kondisi lingkungan sekitar. Suharto (2005: 151) lebih menekankan pendekatan penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan dan melihat konteks situasi.

Disamping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media, atau instrumen untuk mengantar masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah suatu tujuan atau hasil yang dicapai, pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat pesisir memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan, sehingga dengan keberdayaan tersebut mereka akan lebih mudah meraih kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

C. Manajemen Bencana

Manajemen bencana berasal dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Manajemen bencana adalah suatu strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani bencana dengan tujuan untuk mencegah, memprediksi dan mengantisipasi bencana sebatas kemampuan yang dimiliki serta meminimalkan kerugian (Susanto, 2006: 8). Manajemen bencana yang baik harus dilakukan jauh sebelum terjadi bencana dan juga setelah terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Pasal 1 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan manajemen bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pada umumnya penanggulangan bencana alam dibedakan menjadi empat tahapan, yaitu mitigasi, kewaspadaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Penanggulangan bencana bukan hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Menurut Susanto (2006:9) penanggulangan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Strategi dan kebijakan ini bertujuan untuk sedini mungkin mencegah, memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dalam batas-batas kemampuan yang ada serta untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya bencana tersebut. Proses mulai mitigasi/peringatan, kewaspadaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berlangsung secara terus menerus ini disebut dengan siklus manajemen bencana.

1. Mitigasi bencana

Menurut George D. Hadow dan Jane A. Bullock dalam Susanto (2006:11), proses mitigasi melibatkan pencegahan bencana agar jangan sampai terjadi bencana dan juga pengurangan dampak buruk akibat bencana yang sudah terjadi pada tahap minimal. Kebijakan mitigasi dalam manajemen bencana ini adalah sebuah kebijakan jangka panjang. Kebijakan mitigasi dapat bersifat struktural maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat deteksi aktifitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Sedangkan kebijakan non struktural

meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari resiko yang tidak perlu dan merusak kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun non struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi, dan mengurangi resiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peratauran yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang sesuai. Teknologi yang digunakan untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi resiko terjadinya bencana harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan di masa depan.

2. Kewaspadaan

Susanto (2006:12) menjelaskan dalam tahap kewaspadaan pemimpin organisasi baik pemerintah maupun organisasi baik pemerintah maupun swasta menyusun rencana aksi yang harus dilakukan apabila bencana terjadi. Kebijakan kewaspadaan yang biasa dilakukan apabila bencana terjadi adalah pelatihan terhadap petugas medis dalam memberikan pertolongan pertama. Pembangunan dan pelatihan sistem peringatan akan terjadinya bencana yang dikombinasikan dengan tempat tinggal darurat dan rencana evakuasi, penyediaan perlengkapan, yang diperlukan dalam keadaan darurat, dan lain sebagainya.

Peran pemimpin dalam hal ini khususnya pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah, perlu menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat serta membangun komunikasi dan melakukan pendekatan yang efektif dengan masyarakat di daerah rawan bencana yang

bertujuan untuk membantu warga dalam melakukan antisipasi dan menyusun rencana yang diperlukan bila terjadi bencana. Pendekatan dan komunikasi yang dibangun dengan warga setempat harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat sehingga mampu menghasilkan hubungan yang bersifat saling percaya antara pemimpin dan masyarakat setempat.

Hal yang tak kalah penting adalah tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk terlaksana rencana kewaspadaan tersebut. Juga perlu diperhatikan mekanisme penyaluran sumber daya yang dibutuhkan tersebut dan otoritas mana saja yang harus dilibatkan dalam proses penyaluran. Sumber daya yang disalurkan harus dapat dipastikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal dan transparan sehingga dapat meminimalkan kerugian yang terjadi dan meringankan beban korban bencana. Untuk memastikan hal ini pemerintah perlu membuka peluang seluas-luasnya bagi partisipasi seluruh komponen masyarakat.

3. Tanggap Darurat

Tahapan berikutnya dalam Susanto (2006: 13) adalah tahapan tanggap darurat, yang melibatkan mobilisasi tenaga *emergency* yang dibutuhkan untuk memberikan pertolongan pertama, seperti tenaga medis, polisi, militer dan tenaga sukarelawan. Tenaga *emergency* yang didukung oleh rencana aksi yang disusun pada tahap sebelumnya memudahkan koordinasi untuk usaha penyelamatan. Pada tahap ini kemampuan tenaga *emergency* menjadi sangat penting, karena mereka dituntut untuk memberi bantuan, bukan hanya secara fisik dan medis, tetapi juga dorongan secara psikologis. Dalam organisasi swasta maupun pemerintah, pemimpin perlu membuka peluang seluas-luasnya bagi tenaga *emergency* yang

mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Dalam situasi ini tugas pemimpin adalah membantu koordinasi tenaga-tenaga emergency yang ada. Mereka dapat bekerja sebagai sebuah tim yang saling mendukung untuk membantu proses kelancaran penanggulangan bencana agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dalam meringankan beban korban bencana.

4. Sesudah/pemulihan

Tahap terakhir adalah pemulihan, yaitu membangun kembali daerah atau tempat yang terkena bencana sehingga keadaannya menjadi seperti semula atau bahkan lebih baik dibanding sebelum bencana (merekonstruksi). Usaha pemulihan berkaitan dengan pembangunan dan aset-aset yang hancur atau hilang, terutama infrastruktur-infrastruktur yang vital. Menghitung nilai kerugian yang diderita akibat bencana dan biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah atau tempat yang terkena bencana adalah penting.

Namun perlu disadari bahwa tahap pemulihan adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali proses penanggulangan bencana yang telah diterapkan selama ini. Hasil evakuasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih baik. Tahap pemulihan ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan perubahan. Buka saja dalam masalah penanggulangan bencana, tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan lainnya, karena biasanya manusia mau menerima perubahan apabila terjadi peristiwa buruk yang menimpa dan memaksa mereka melakukan perubahan (Susanto, 2006: 12).

Tentunya dalam manajemen bencana ini prinsip-prinsipnya berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2007. Selain itu, penanggulangan bencana juga didasarkan pada prinsip-prinsip praktis seperti cepat dan tepat, prorotas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi dan non-proselitisi dalam Nurjanah (2012: 45-47) diartikan:

1. Cepat dan tepat, adalah bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas, dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan,
3. Koordinasi dan keterpaduan, dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
4. Berdaya guna dan berhasil guna, dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. Transparansi dan akuntabilitas, dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan, adalah penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
7. Pemberdayaan, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan melibatkan korban bencana secara aktif. Korban bencana hendaknya tidak dipandang sebagai objek semata.
8. Non diskriminatif adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan berbeda yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
9. Non proselitisi, adalah dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Upaya untuk membentuk ketahanan masyarakat akan bencana wilayah pesisir adalah sebagai berikut (Anonim, 2012):

1. Mempromosikan kesadaran publik

Diperlukan membelajarkan publik, melalui bahan/alat komunikasi mitigasi, media massa, dan cara-cara lainnya, untuk dapat upaya-upaya perencanaan sampai pada masyarakat yang dilakukan secara periodik sehingga masyarakat tidak lengah, karena bencana datangnya selalu tiba-tiba. Kesiapsiagaan merupakan faktor kunci dari mitigasi bencana.

2. Memelihara perspektif yang komprehensif

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta instansi terkait perlu menjelaskan pada seluruh masyarakat untuk memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya.

3. Mengintegrasikan perencanaan mitigasi dengan proses pengambilan keputusan lokal.

Pemerintah daerah perlu menjamin semua nilai dan prioritas dari pelaku pembangunan untuk mengimplementasikan mitigasi bencana pada tiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

4. Melakukan analisis resiko masyarakat

Pemerintah daerah perlu memahami tingkat kerentanan masyarakat, seperti implikasi biaya, sumberdaya, dan kesempatan, yang berkenaan dengan bencana wilayah pesisir.

5. Menciptakan dan menggunakan jaringan sumberdaya mitigasi bencana

Pemerintah perlu memperbaiki akses akan informasi yang baik dan mengembangkan dan melaksanakan strategi mitigasi. Informasi ini termasuk sumberdaya lokal, nasional, dan internasional, seperti penelitian, literatur, contoh kasus, spesialis, ahli lokal, dan metodolgi-metodologi yang berguna.

D. Pengembangan Desa

Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku, yaitu perilaku yang berdiri dari pengetahuan, kecakapan dan sikap (Moekijat, 1991: 81).

Peran desa dan masyarakat desa dalam pembangunan menurut Pranoto (2007:30) antara lain:

- a. Dikawasan pedesaan tumpuan hidup dan kehidupan, pertumbuhan atau perkembangan desa dan masyarakat terletak pada pertanian.
- b. Masih sering terjadi pada masyarakat desa konflik antara pola hidup tradisional dan pola hidup yang dinamis dihadapkan sikap hidup berpartisipasi dan gotong royong.
- c. Dengan pola penghasilan yang sederhana kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya masih *subsistence* atau ditujukan terutama untuk dapat menghidupi keluarganya karena itu pola tabungan atau intervensi masih belum berkembang terutama dikawasan pedesaan telah tata desa tradisional.
- d. Pada beberapa kawasan pedesaan telah dikenal tata desa tradisional.
- e. Pemanfaatan sikap gotong royong kelompok masih tertuju kepada kegiatan sosial budaya, belum secara eksplisit diorientasikan untuk keuntungan atau kepentingan ekonomi.

Selanjutnya dalam pembangunan desa, terdapat tiga komponen penting dalam perencanaan dan pembinaan pedesaan menurut Sairin (2001: 254):

- a. Perencana (*policy maker*) adalah mereka yang secara teoritis mengembangkan konsep, strategi, dan metodologi yang dipandang dapat diandalkan dalam upaya mencapai tujuan pembinaan masyarakat.
- b. Agen adalah petugas yang berusaha menerjemahkan ide dan pikiran pada perencana kepada masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan.

- c. Masyarakat yang dijadikan sasaran (*adobts*) adalah unsur penerima gagasan (*adopters*) umumnya mereka menunggu dan seringkali bersifat pasif.

Sedangkan dalam pembangunan desa diperlukan pembangunan masyarakat untuk mendukung pembangunan. Menurut Sairin (2001: 257) pembangunan masyarakat desa secara teoritis terdapat tiga macam pendekatan pembangunan:

- a. Mobilisasi merupakan pembangunan yang berangkat dari model pembangunan *top-down*, pada pendekatan ini masyarakat yang jadi sasaran tidak punya andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan.
- b. Partisipatif disebut sebagai pendekatan yang berakar dari model *bottom-up development*. Adapun kelemahan dari pendekatan ini adalah pembinaan yang tidak dapat berjalan dalam jangka waktu lama.
- c. Akulturasi ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan yang sedikit mencampuri urusan “rumah tangga”, masyarakat yang dijadikan sasaran. Kelemahan pendekatan ini yakni perlunya modal yang besar untuk melaksanakannya, karena menyangkut biaya pendirian proyek dan biaya untuk pemeliharanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki sesuai dengan yang diteliti yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat siaga bencana melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005: 234) adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas.

1. Pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang.
 - a. Motivasi.
 - b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.
 - c. Mobilisasi sumber daya
 - d. Pengembangan jejaring
2. Faktor penghambat pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakannya suatu penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Yang menjadi situs penelitian ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang dan Desa Sitarjo Kecamatan

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Desa Sitarjo karena memiliki potensi bencana dan memerlukan manajemen bencana.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut pendapat Lofland dalam (Moleong, 2005: 157) mengemukakan bahwa sumber data penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi data yang dibutuhkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara oleh penulis dengan narasumber yang dianggap menguasai permasalahan yang ada, yaitu:

- a. Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
- b. Tim PDPT
- c. Kelompok Masyarakat Pesisir
- d. Masyarakat sasaran Program PDPT

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, catatan, dan arsip yang terkait dengan fokus penelitian yang ada. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. Dokumen merupakan

sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, serta berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2002: 126) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majalah dan surat kabar referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk menjalin hubungan dengan partisipan agar memperlancar dalam proses penelitian.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi

penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

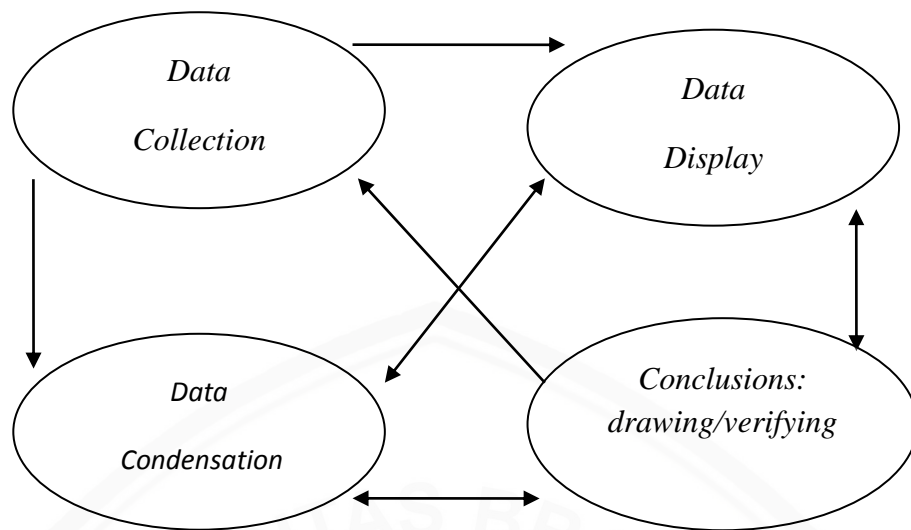
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Sugiyono (2014:59) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematis menggunakan beberapa alat bantu. Instrumen yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, dengan semua aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan melakukan wawancara.
2. Instrumen pembantu, terdiri dari:
 - a. Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan.
 - b. Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian ditunjang dengan pengambilan gambar.

G. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014:33) analisis data kualitatif terbagi menjadi 3 proses dalam menyajikan sebuah data diantaranya dari mengumpulkan data yang ada (*Data collection*), pertama merupakan kondensasi data (*Data condensation*), tampilan data (*Data display*), dan kesimpulan (*Conclusions*).

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*): merupakan proses memilah data, pemfokus, penyederhanaan, meringkas data yang ada baik itu dari tulisan, catatan lapangan, hasil transkrip wawancara, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan bahan-bahan empiris lainnya.
2. Penyajian data (*Data display*) dalam (Miles, Huberman and Saldana 2014:31) mengemukakan "*The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text.*" Jadi yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat diperpanjang. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (*Conclusions*), kemudian pada tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Sugiyono, 2014:99) mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau suatu gambaran obyek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal/interaktif, hipotesis/teori.



Gambar 1 *Qualitative data analysis* (Miles, Huberman, and Saldana 2014:33)

H. Keabsahan Data

Penelitian memerlukan pengecekan keabsahan data untuk mempertanggungjawabkan kebenaran penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk keabsahan data, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuaannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keterahlihan (*transferability*)

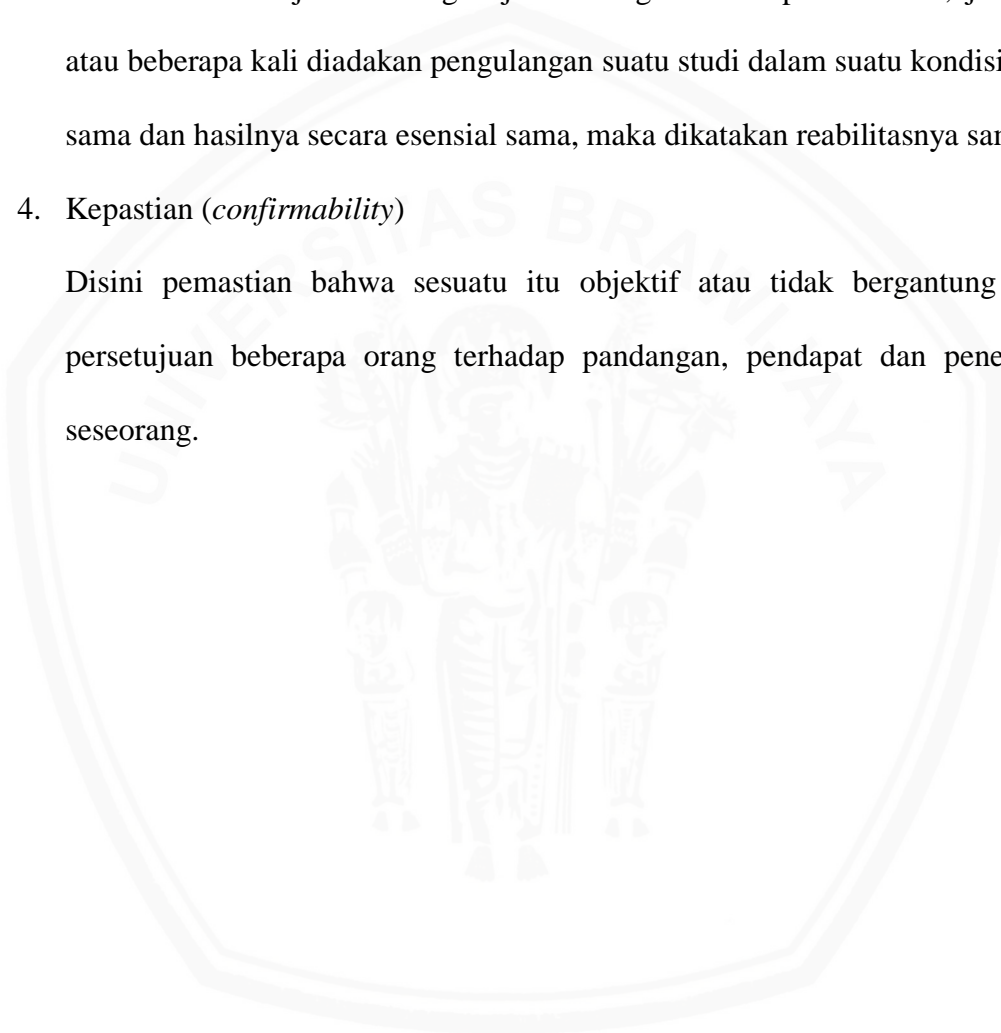
Kriteria ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi, jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya sama.

4. Kepastian (*confirmability*)

Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang awalnya merupakan cabang dinas milik Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dengan nama “Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang”. Selanjutnya sejalan dengan semangat otonomi daerah, pada tahun 1993 Dinas Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dengan nama “Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang”. Setelah era reformasi tepatnya di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di mana saat itu Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen tersendiri dengan nama Departemen Eksplorasi Laut dengan Menteri Ir. Sarwono Kusumaatmadja, maka pada tahun 2001, Dinas Kelautan dan Perikanan pun berubah menjadi “Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang”. Namun pada akhir tahun 2004, sejalan diterapkannya PP 8 Tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan digabung dengan Dinas Peternakan menjadi “Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang”.

Kemudian terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 seiring diterapkannya PP No. 41 Tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang menjadi dinas tersendiri dengan nama “Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang” yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tanggal

28 Februari tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perbup No. 18 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dasar hukum dari Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang organisasi dan perangkat daerah.
- e. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang organisasi perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan rencana strategis DKP 2010-2015 yaitu Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

- Memberdayakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan iklim usaha yang kondusif
- Mewujudkan sumberdaya perikanan yang berkualitas
- Menciptakan kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari

Kebijakan Strategis :

1. Pengembangan kawasan sentra produksi penangkapan dan budidaya perikanan
2. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan
3. Pemberdayaan kelembagaan Kelompok dan SDM kelautan dan perikanan

2. Gambaran Umum Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Sejarah, Struktur Pemerintahan Desa

Menurut informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh, Desa Sitarjo didirikan oleh orang yang bernama Kyai Ngastowo pada tahun 1895 membuka hutan dibagian daerah Palunglor. Babatan palung lor inilah yang kemudian dinamakan Pondhok Dhulang, karena terus berkembang pesat kemudian berubah menjadi Sitarjo .

Desa Sitarjo terbagi menjadi 4 (empat) wilayah dusun yaitu :

- 1.Dusun Sitarjo (Krajan)
- 2.Dusun Rowotrate
- 3.Dusun Tambak Redjo
- 4.Dusun Sendang Biru

Pada tahun 1978 Dusun Tambak Redjo dan Dusun Sendang Biru mengalami pemekaran menjadi desa sendiri Desa Tambak Redjo bersama Dusun Tamban.

Wilayah Desa Sitarjo yang semula terdiri dari 2 (dua) Dusun, pada tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi 4 (empat) Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan Wetan
2. Dusun Krajan Tengah
3. Dusun Krajan Kulon
4. Dusun Rowotrate

Geografi dan Administrasi

Secara geografis desa Sitarjo terletak pada $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40' \text{ Bujur Timur}$. Jarak tempuh Desa Sitarjo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 58 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

Secara administrasi, Desa Sitarjo terletak di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa desa tetangga yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberagung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambakrejo dan Kedungbanteng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi, dan Gajah Rejo Kec. Gedangan



Gambar 2.. Peta Administrasi lokasi Desa Sitarjo

Topografi desa sitiarjo terdiri dari dataran dan perbukitan. Wilayah berupa dataran memiliki luas 555 Ha atau 16,7% dan perbukitan/ pegunungan memiliki luas 2.758 Ha atau 83,3%. Ketinggian wilayah desa berupa dataran berada sekitar 5 - 10 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dataran rendah berupa lembah (cekungan) dikelilingi oleh perbukitan kapur dengan ketinggian berkisar 200 m – 650m diatas permukaan laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun

2008, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Sitarjo rata-rata mencapai 2.800 mm.

Kondisi tanah di desa Sitarjo sesuai topografi maka terdapat dua jenis yaitu dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tanah di dataran rendah berupa tanah humus yaitu tanah yang dilapisan atas berwarna gelap dan bersifat gembur. Tanah humus terbentuk dari pembusukan tumbuh-tumbuhan. Lahan persawahan di desa Sitarjo terdapat beberapa kelas berdasarkan kesuburannya :

- Sangat subur : 432 Ha
- Subur : 2.561 Ha
- Sedang : 321 Ha

Di Dusun Rowotrate terdapat dua lokasi lahan yang tingkat pemanfaatannya dari segi produktivitas kurang baik. Lahan tersebut berupa areal persawahan yang secara topografi dikelilingi oleh perbukitan yang gundul. Di areal tersebut juga terdapat rawa yang sama sekali tidak produktif dari segi pertanian, namun didalamnya terdapat sumberdaya ikan gabus yang cukup besar. Pada waktu musim penghujan lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya air dari perbukitan disekitarnya, merendam areal persawahan sehingga dapat menyebabkan tanaman padi mati.

Kondisi tanah di perbukitan berupa perbukitan kapur merupakan jenis podzolik. Tanah podzolik mudah ditemukan di pegunungan bercurah tinggi dan beriklim sedang. Tanah jenis ini terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung banyak kuarsa sehingga warna tanah ini kecoklatan. Tanah ini kurang subur karena mineral terbawa oleh air hujan.

. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa Sitiarjo adalah terdiri dari 2.363 KK, dengan jumlah total 7.683 jiwa, dengan rincian 3.765 laki laki dan 3.918 perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	0--4	219	224	443	5.77%
2	5--9	178	183	361	4.70%
3	10--14	217	224	441	5.74%
4	15--19	249	259	508	6.61%
5	20--24	292	301	593	7.72%
6	25--29	327	337	664	8.64%
7	30--34	338	347	685	8.92%
8	35--39	348	352	700	9.11%
9	40--44	352	358	710	9.24%
10	45--49	334	341	675	8.79%
11	50--54	322	329	651	8.47%
12	55-58	242	254	496	6.46%
13	59>	347	409	756	9.84%
JUMLAH		3,765	3,918	7,683	

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun

Desa Sitiarjo sekitar 4.027 atau hampir 51 % .

Penduduk Desa Sitiarjo banyak menempati pada dusun Krajan (Krajan Kulon,

Tengah dan Wetan) seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Sebaran Penduduk Berdasarkan RT-RW Desa Sitiarjo

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Krajan Wetan	21	4
2	Krajan Tengah	15	4
3	Krajan Kulon	20	5
4	Rowotrate	5	2
Jumlah		61	15

Penduduk Desa Sitarjo mayoritas memeluk agama Kristen (85%), sedangkan sebagian kecil memeluk agama Islam (15%). Kedua umat beragama hidup rukun berdampingan saling menghormati. Tingkat pendidikan penduduk Desa Sitarjo berdasarkan data profil desa tahun 2012 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitarjo

No	Keterangan	Jumlah	
1	Tidak tamat SD	898	Orang
2	Tamat SD	991	Orang
3	Tamat SLTP/ Sederajat	3.958	Orang
4	Tamat SLTA/ Sederajat	1.211	Orang
5	Tamat D-1	41	Orang
6	Tamat D-2	14	Orang
7	Tamat D-3	12	Orang
8	Tamat S-1	89	Orang
9	Tamat S-2	2	Orang

Berdasarkan data dari profil Desa Sitarjo tahun 2012, penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja (pengangguran) sejumlah 489 orang.

Kondisi Ekonomi

Aktivitas ekonomi masyarakat

Sebagian besar penduduk desa Sitarjo mempunyai mata pencaharian sebagai petani sebanyak 2.536 orang (76%). Selain mengolah lahan sawah dan kebun, sebagian besar masyarakat juga memiliki ternak berupa sapi, kambing, ayam, dll. Hanya sebagian kecil yang bermata pencaharian di sektor jasa/perdagangan sebanyak 483 orang (14,5%) dan sektor industri 303 orang (9%). Mata pencaharaan penduduk di bidang jasa/ perdagangan terdiri dari beberapa bidang seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4 Mata Pencarian Penduduk di Bidang Jasa/ Perdagangan

No	Status	Pemilik	Pekerja
1	Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan		
a.	Pegawai Desa		16
b.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	1) Pegawai Kelurahan		1
	2) PNS		22
	3) ABRI		6
	4) Guru		38
	5) Dokter		1
	6) Bidan		2
	7) Perawat		3
	8) Lain-lain		12
c.	Pensiunan ABRI/Sipil		64
d.	Pegawai swasta		347
e.	Pensiunan swasta		347
f.	Pegawai Koperasi	4	24
2.	Jasa Perdagangan		
a.	Pasar Desa	1	379
b.	Warung	8	8
c.	Kios	18	18
d.	Toko	71	78
3.	Jasa Angkutan/ Transportasi		
a.	Angkutan bermotor	29	29
b.	Mobil Kendaraan umum	4	8
4.	Jasa Keterampilan		
a.	Tukang kayu		52
b.	Tukang Batu		44
c.	Tukang Jahit/ bordir		9
d.	Tukang cukur		7
e.	Jasa Listrik, Gas dan Air		3
f.	Persewaan		4

Sumber : Data Dasar Profil Desa Tahun 2012, Sitarjo

Masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan sangat sedikit dan semuanya berdomisili di Dusun Rowotrate. Nelayan desa Sitarjo merupakan nelayan kecil yang selama ini mencari ikan dengan memasang jaring di area terumbu karang dengan cara berenang dan menyelam karena tidak memiliki alat bantu penangkapan berupa perahu. Dulu mereka memiliki perahu meski ukurannya kecil, tapi saat ini sudah tidak lagi. Ada diantaranya yang hilang dicuri

orang, ada juga yang hanyut terbawa air. Banyak diantara nelayan yang juga terpaksa menjadi abk perahu, atau menjalankan perahu milik juragan dari sendangbiru. Nelayan desa Sitarjo belum memiliki kelompok sehingga mengalami kesulitan untuk mengajukan bantuan pemerintah. Kegiatan PDPT memfasilitasi nelayan untuk dapat membentuk kelompok dan mengajukan bantuan pada pemerintah.

Berdasarkan data dari buku RKK desa Sitarjo tahun 2012, pendapatan warga perbulan adalah Rp. 750.000/ orang.

Kegiatan perikanan di desa Sitarjo terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar. Perikanan tangkap diusahakan dengan peralatan yang sangat terbatas yaitu menggunakan jaring gill net di area terumbu karang. Hasil ikan tangkapan berupa ikan-ikan karang seperti udang barong, kakap, tambakan, kerapu, dll. Data produksi perikanan tangkap di desa Sitarjo belum ada sama sekali. Sementara perikanan air tawar yaitu budidaya ikan lele mampu berproduksi 1 ton senilai Rp. 15.000.000,-.

Sarana dan prasarana sosial di desa Sitarjo cukup lengkap seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5 Sarana dan Prasarana Sosial di Desa Sitiarjo

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Sosial		
	a.Lapangan sepak bola	2 buah	Baik
	b.Lapangan volly	5 buah	Baik
	c.Lapangan bulutangkis	2 buah	Baik
2.	Pendidikan		
	a.Taman Kanak-kanak	2 buah	Baik
	b. SD/ Sederajat	4 buah	Baik
	c.SLTP/ sederajat	1 buah	Baik
	d.SLTA/ sederajat	1 buah	Baik
3.	Rumah ibadah		
	a.Masjid	3 buah	Baik
	b.Langgar/ Surau	2 buah	Baik
	c.Gereja	18 buah	Baik
4.	Fasilitas kesehatan		
	a.Puskesmas	1 buah	Baik
	b.Polindes	1 buah	Baik
	c. Rumah memiliki WC	1.587 buah	Baik
5	Prasarana Air Bersih		
	a.Sumur pompa	34 buah	Baik
	b. Sumur gali	1.097 buah	Baik
	c.Perpipaan	1 buah	Baik
	d. Mata air	3 buah	Baik

Sumber : Data Dasar Profil Desa Tahun 2012, Sitiarjo

B. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang

a. Motivasi

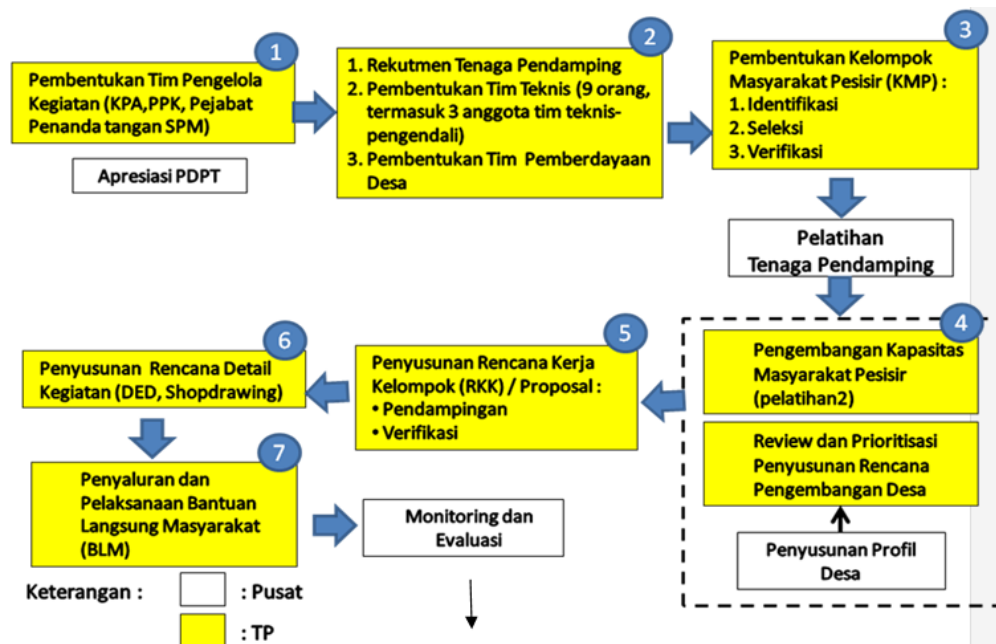
Setiap individu perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Dalam program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) akan dibentuk kelompok masyarakat pesisir yang

disebut KMP dan didampingi oleh pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini berfokus kepada bina siaga bencana dan perubahan iklim pada PDPT

Model PDPT terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rencana pengembangan desa pesisir; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PDPT. Untuk RPDP dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* dengan memperhatikan perencanaan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, antara lain seperti Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, Rencana Zonasi WP3K di kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota, dan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota.

Tahapan kegiatan pelaksanaan PDPT di daerah melalui Tugas Pembantuan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pusat. Tahapan pelaksanaan kegiatan PDPT mengadopsi siklus konsep *Integrated Coastal Management* dimana memiliki konsep keterpaduan dan berkelanjutan dalam mengelola kegiatan mulai dari tahapan identifikasi hingga evaluasi (penyusunan laporan).

Tahapan lokasi PDPT meliputi 8 (delapan) tahapan sebagaimana dijelaskan pada gambar



Gambar 3: Tahapan pelaksanaan PDPT

(Pedoman PDPT hal : 16)

PDPT mendorong masyarakat untuk terlibat langsung kegiatan pengembangan desa agar tangguh melalui lima bina. Bina yang diambil dalam penelitian ini adalah bina siaga bencana dan perubahan iklim. Desa Sitiarjo merupakan desa yang terdampak langsung bencana banjir setiap tahun. Diperlukan pembenahan sistem siaga bencana yang terpadu antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Di dalam PDPT di bentuk kmp yang bisa menjadi wadah warga untuk bersama menangani masalah bencana.

Kelompok Masyarakat Pesisir dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. KMP yang ditetapkan dapat berupa kelompok masyarakat yang baru dibentuk atau kelompok masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya yang telah dievaluasi dan berkinerja baik.

KMP bertugas untuk:

- a. Menyusun Rencana Kerja Kelompok sesuai dengan kebutuhan desa yang tertuang dalam RPDP
- b. Melengkapi data-data administrasi untuk pengajuan BLM
- c. Membelanjakan dana BLM sesuai dengan RKK yang telah disusun dan disetujui oleh KPA
- d. Membuat pembukuan keuangan sederhana terkait belanja BLM PDPT
- e. Membuat laporan pemanfaatan BLM PDPT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan KMP akan didampingi tim pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yaitu Pon Lindah (pegawai kontrak program DKP Kabupaten Malang). Tenaga Pendamping PDPT terdiri atas 4 (empat) orang yang salah satunya ditunjuk sebagai koordinator, diutamakan berkinerja baik serta berpengalaman dalam kegiatan pendampingan pada program pemberdayaan masyarakat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Tim pendamping bertugas untuk mendampingi kegiatan kmp. Kepala desa Sitarjo dan tim Pendamping perlu melakukan sosialisasi mengenai PDPT kepada warga agar mau ikut terlibat menjadi kelompok masyarakat pesisir. Tapi ketika yang dibahas adalah siaga bencana langsung diarahkan ke dusun Rowo yang memang langganan bencana banjir menurut Kepala Desa Sitarjo. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Pon Linda selaku pendamping PDPT desa Sitarjo.

“Jadi ketika ada sosialisasi bencana langsung mengarah ke dusun Rowo tanpa ada usulan dan keterlibatan masyarakat lain. Sosialisasi yang harus

satu desa jadi terkutat satu dusun saja. Baru ketemu salah satu tokoh masyarakat yang bisa diajak mensosialisasikan program”. (9 Desember 2015, jam 14.20 di rumah bu Pon Lida)

Warga tidak sepenuhnya tahu jika ada program PDPT dan pembentukan tim kmp. Setelah tim pendamping bertemu salah satu tokoh masyarakat, ada warga tahu tentang program tersebut. Warga mulai antusias untuk ikut kelompok dalam program PDPT, itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Enggar selaku ketua KMP GAT Sitarjo.

“Tahu ada PDPT masuk dari mbak Pon (pendamping dari DKP) karena tidak ada sosialisasi ke masyarakat dari desa, baru setelah rapat di Balai Desa ada sosialisasi. Kegiatan pdpt untuk Sitarjo ada mitigasi bencana, penghijauan, konservasi penyu, KMP wisata alam, rabat beton, makadam jalan, pembibitan.” (15 Desember 2015 di rumah Bapak Enggar Sitarjo)”

Lebih lanjut masyarakat desa Sitarjo sebelum ada program ini sudah ada beberapa kelompok sendiri. Kehadiran kelompok ini memudahkan dalam pembentukan KMP, jadi kelompok yang sudah ini dimasukan dalam kmp dan kekurangan kelompok lain di bentuk oleh tim pendamping dan kepala desa. Hal itu diungkapkan Bapak Enggar.

“sebelum program ini ada masyarakat sudah punya kelompok masyarakat sendiri, jadi ketika program ini ada kmp yang sudah ada tinggal masuk dan apabila dibutuhkan kelompok lain, baru kelompok baru dibentuk oleh desa.” (15 Desember 2015 di rumah Bapak Enggar Sitarjo)”

Ketika kegiatan dimulai warga tidak memandang penting siaga bencana karena hal itu dianggap sudah hal yang biasa terjadi di Sitarjo. Tim pendamping kesulitan untuk mendapat KMP yang mau untuk fokus pada siaga bencana. Warga lebih tertarik dengan bina fasilitas dalam program PDPT ini. Warga lebih melihat fasilitas lebih penting karena berdampak langsung dibandingkan dengan pemberdayaan siaga bencana dianggap tidak berdampak.

Pada tahun 2013 terjadi banjir di Sitiarjo yang memaksa warga untuk mau ikut menyertakan usulan siaga bencana dalam kegiatan KMP. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Pon Linda selaku pendamping.

“Dalam merencanakan program untuk memetakan masalah bencana masyarakat menganggap hal itu sudah biasa terjadi mau diapakan lagi. Jadi ketika rapat usulan untuk RPDP hanya terpusat ke fasilitas yang tidak ada hubungan dengan kebencanaan.tidak ada usulan mengenai fasilitas mitigasi bencana seperti jalur evakuasi. Pada tahun 2013 saya berat meyakinkan warga tentang pentingnya siaga bencana. Baru ketika terjadi banjir masyarakat mau menerima konsep siaga bencana dengan terpaksa. Dari semua kmp yang ada, tidak satupun yang mau untuk menjalankan kegiatan siaga bencana sampai akhirnya ada kelompok yang dipimpin oleh pak Enggar yang mau mengerjakan siaga bencana.” (9 Desember 2015, jam 14.20 di rumah bu Pon Linda)

Setelah KMP berjalan mulai berjalan dan mulai menunjukkan hasil yang baik warga mau ikut langsung dalam kegiatan. Ini langkah penting untuk kegiatan pengembangan masyarakat desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Enggar.

“ketika kmp berjalan dan terlihat hasilnya, masyarakat mulai tertarik dan saya bisa memberikan gagasan dengan mudah. Kita melakukan makadam jalan partisipasi warga bisa mencapai 50% lebih.” (15 Desember 2015 di rumah Bapak Enggar Sitiarjo)

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

PDPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada *coastal resilient village Community* dimana partisipasi komunitas desa pesisir menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh.

Desa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat

kemiskinan masyarakat pesisir. Pengetahuan masyarakat desa pesisir tentang bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, serta rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Desa pesisir juga rentan secara lingkungan dan fisik. Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi listrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat bencana maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di pesisir secara umum telah mengalami kerusakan.

Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (antara lain jalur evakuasi, *shelter*, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.

Masyarakat desa Sitiarjo semula menganggap bencana hal yang memang sudah takdir tanpa perlu melakukan pencegahan atau mitigasi bencana. Baru ketika hasil penangkapan ikan yang berdampak langsung pada penghasilan, masyarakat mulai berfikir bagaimana cara mengantisipasi terjadi bencana. Ketika PDPT masuk maka hal pertama yang dilakukan menumbuhkan kesadaran akan

pentingnya siaga bencana. Peningkatan sumberdaya baik itu sumberdaya alam atau sumberdaya manusia diperlukan untuk mencapai masyarakat siaga bencana.

Hal itu diungkapkan Bapak Enggar selaku ketua KMP GAT.

“Pak Enggar: iya memang untuk yang siaga bencana sulit karena masyarakat hanya mau untuk yang fasilitas. Ini semua dimulai dari hasil penangkapan ikan yang merosot dan ketika diteliti ternyata karena kerusakan alam, dari situlah masyarakat mau ikut dalam program siaga bencana ini, Sitarjo pada bulan Juli mengalami bencana banjir karena kerusakan hutan. Kegiatan pdpt untuk Sitarjo ada mitigasi bencana, penghijauan, konservasi penyu, KMP wisata alam, rabat beton, makadam jalan, pembibitan. Desa pesisir memang diharapkan menjadi daerah yang tangguh karena merupakan daerah vital karena dekat dengan pelabuhan sebagai pintu keluar masuk dan juga sebagai wilayah yang rawan bencana. Penguatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia adalah untuk mencapai hal tersebut agar menjadi wilayah yang tangguh.” (15 Desember 2015 di rumah Bapak Enggar Sitarjo)

Hal selaras juga diungkapkan Ibu Pon Linda selaku pendamping PDPT desa Sitarjo.

“alam merencanakan program untuk memetakan masalah bencana masyarakat menganggap hal itu sudah biasa terjadi mau diapakan lagi. Jadi ketika rapat usulan untuk RPDP hanya terpusat ke fasilitas yang tidak ada hubungan dengan kebencanaan.tidak ada usulan mengenai fasilitas mitigasi bencana seperti jalur evakuasi.” (9 Desember 2015, jam 14.20 di rumah bu Pon Linda)

Kondisi masyarakat Sitarjo yang masih acuh terhadap siaga bencana memaksa tim pendamping untuk mengarahkan usulan warga. Hal itu juga diungkapkan oleh Kepala desa Sitarjo Bapak Lsipijanto Daud.

“selama ini bencana di Sitarjo ada dari dusun Rowo, jadi saya arahkan ke sana supaya mudah koordinasinya. Tapi malah dusun lain gak mau ikut untuk siaga bencana, jadi waktu yang mengusulkan lampu penerangan jalan saya arahkan ke solarcell agar sesuai dengan bina siaga bencana”.(17 september 2015, jam 11.00 di Balai Desa).

Ketika warga mengusulkan untuk memperbaiki fasilitas desa Sitarjo, pendamping mengarahkan agar sesuai dengan siaga bencana. Fasilitas tersebut bisa berupa jalan yang diarahkan ke jalur evakuasi. Berikut adalah kegiatan PDPT di desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Tabel 6: Kegiatan KMP Sitiarjo 2013

No	Kelompok	Kegiatan yang Diajukan
1	Siaga Bencana	1. Pembuatan jalur evakuasi ke bukit
		2. Pengadaan Alat-alat siaga bencana
		3. Pembuatan Pos Pantau siaga bencana
2	Pengelolaan Sampah Krajan Wetan	Pembuatan bak sampah permanen
3	Pengelolaan Sampah Krajan Tengah (RAPI)	Pembuatan bak sampah permanen
4	Penghijauan Krajan Wetan (Harapan Jaya)	Penanaman bibit pohon manggis di sempadan sungai di krajan wetan
5	Penghijauan Rowotrate (Teratai Indah)	Penanaman bibit pohon manggis di sempadan sungai di dusun Rowotrate
6	Makadam jalan (Mekar Jaya)	Macadam jalan menggunakan batu putih
7	Penghijauan Pesisir	Penanaman pohon mangrove, geben, dan pucung
8	Wisata Alam	Pengadaan alat wisata sungai
9	Konservasi Penyu	Pembuatan pusat penelitian dan pembelajaran penyu
10	Tani Maju	Pembuatan jalan rabat beton

Ketika masyarakat menginginkan lampu jalan mengarahkan untuk kegiatan bencana karena dari KKP meginstruksikan untuk lebih fokus bencana dan perubahan iklim. Setelah koordinasi dengan pak Kades barulah membuat lampu penerangan jalan tapi yang berbasis solar cell agar ketika banjir tetap menyala. Berikut adalah gambar mengenai pembangunan fasilitas penunjang siaga bencana.



Gambar 4 : Pembuatan Jalur Evakuasi Banjir Desa Sitarjo
Sumber : Majalah PDPT Kabupaten Malang (2015: 36)



Gambar 5: Pembuatan Pos Pantau Pasang Surut air di muara
Sumber : Majalah PDPT Kabupaten Malang (2015: 39)

Sebetulnya kita ada rencana untuk melakukan pelatihan siaga bencana, tapi sudah ada dari PMI. Tetapi pelatihan tersebut sesuai dengan kondisi bencana daerah tersebut, Sitarjo malah dikasih pelatihan siaga banjir malah dikasih siaga

gempa bumi. Jadi dari tim PDPT tidak ada kegiatan tersebut karena masyarakat merasa sudah ada. Kalau dari rencana awal ada tapi tidak jadi.

c. Mobilisasi Sumber Daya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.

Penyaluran Dana BLM PDPT dilakukan secara langsung yaitu dari rekening KPPN ke rekening masing-masing KMP. Jumlah dana yang ditransfer ke rekening masing-masing KMP sesuai dengan RKK dan RAB yang telah disetujui oleh Tim Teknis Daerah. Pencairan dana dilaksanakan oleh Pengurus inti masing-masing KMP di Bank BRI Sendangbiru-Malang Selatan. (Laporan akhir PDPT Kabupaten Malang : 72).

Jadi salah satu tugas pendamping monitor dan evaluasi usulan dari anggota KMP. Mulai dari awal ada usulan dari anggota ke rapat KMP selanjutnya apabila pendamping setuju maka membuat proposal. Ketika proposal diterima maka dana BLM diberikan kepada KMP untuk melakukan kegiatan.

“Pendamping selalu mengecek kemajuan kelompok menggunakan BLM dari program. Jadi pendanaan langsung dipegang kelompok dengan pendampingan. Alur dari PDPT dari usulan ke RPDP ke kegiatan baru membuat kelompok, jadi ketika usulan ada ternyata sudah ada kelompok yang bisa memegang kegiatan itu. dibentuk kelompok dulu baru anggota kelompok memilih ketua dan membuat usulan untuk diajukan ke pendamping.” (9 Desember 2015, jam 14.20 di rumah bu Pon Linda)

Keluarga yang melibatkan perspektif ekonomi, keluarga akan menanyakan apa kegiatan ini menguntungkan secara ekonomi. Yang selanjutnya biaya, karena ketika dana bantuan tidak mencukupi maka ditutupi dengan swadaya masyarakat.

Masyarakat banyak yang mampu untuk melakukan swadaya anggaran karena tidak ada keuntungan ekonomi secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh bapak Budi Rianto, S.Pi selaku Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Malang.

“Ketika kita akan membuat kelompok masyarakat hal pertama yang dilihat adalah keuntungan ekonomi. Karena memang warga ingin kegiatan tersebut menguntungkan secara finansial. Warga juga khawatir kalau kegiatan tersebut akan menggunakan dana pribadi mereka.”(10 Oktober 2015 jam 12.4, di kantor DKP Kabupaten Malang)

Untuk mendapat bantuan langsung berupa BLM, KMP harus mampu membuat kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Pendamping memberi pelatihan bagaimana usulan kegiatan tersebut juga sudah dalam bentuk rincian dana. Kelompok sendiri yang harus merumuskan pendanaan kegiatan dengan pelatihan yang juga melibatkan tim pendamping dan tim pemberdayaan desa. Setelah itu dibuat rencana kegiatan kelompok seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7: Rencana Kegiatan Kelompok Desa Sitiarjo

JENIS KEGIATAN	VOLUME/UKURAN	NAMA KMP	ANGGARAN		TOTAL	LOKASI	TAHAPAN
			PDPT	SWADAYA			
BINA SIAGA BENCANA & PERUBAHAN IKLIM							
Penghijauan sempadan sungai dan daerah kering (durian)	300 pohon	Ngudi Mulyo	15,000,000	1,000,000	16,000,000	Dusun Krajan Kulon	1
Penghijauan sempadan sungai dan daerah kering (durian)	250 pohon	Ngudi Mulyo	12,500,000	950,000	13,450,000	Dusun Krajan Kulon	2 2
Penghijauan daerah sumber air	150 pohon	Tirta Jaya	7,500,000	575,000	8,075,000	Dusun Krajan Wetan	2
Penghijauan daerah rawan longsor, sempadan sungai & tepi jalan	1.740 pohon	RAPI	12,930,000	6,660,000	19,590,000	Dusun Krajan Tengah	2
Pengadaan Radio Rig	1 unit	GAL	4500000	0	4,500,000	Sitiarjo	2

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, 2014

d. Pembangunan Dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Program PDPT Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang memerlukan sinergi jaringan antar lembaga. Banyak lembaga yang terkait mulai dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Malang, Pemerintah desa Sitarjo, tim pendamping, dan Kelompok Masyarakat Pesisir. Dan yang terlibat langsung dengan masyarakat adalah pemerintah desa, pendamping dan juga KMP. Maka dari itu peran mereka sangat menentukan dan diperulka sinergi agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program PDPT. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Pon Linda selaku pendamping PDPT desa Sitarjo.

“Ketika masyarakat menginginkan lampu jalan kita mengarahkan untuk kegiatan bencana karena dari KKP meginstruksikan untuk lebih fokus bencana dan perubahan iklim. Setelah koordinasi dengan pak Kades barulah kita membuat lampu penerangan jalan tapi yang berbasis solar cell agar ketika banjir tetap jalan.setiap kmp dan stakeholder terkait harus saling membantu untuk mensukseskan kegiatan ini. Semua saling membantu sesuai kemampuan masing-masing.” (9 Desember 2015, jam 14.20 di rumah bu Pon Linda)

kelompok-kelompok yang sudah ada di akomodir untuk masuk di PDPT jadi komunikasi jaringan mudah.

2. Faktor-faktor Menghambat Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang

Faktor Penghambat

- 1) Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang pemberdayaan siaga bencana. Setidaknya itu terlihat dari pernyataan Bapak Enggar selaku ketua KMP GAL.

“iya memang untuk yang siaga bencana sulit karena masyarakat hanya mau untuk yang fasilitas. Ini semua dimulai dari hasil penangkapan ikan yang merosot dan ketika diteliti ternyata karena kerusakan alam, dari situlah masyarakat mau ikut dalam program siaga bencana ini, Sitarjo pada bulan Juli mengalami bencana banjir karena kerusakan hutan. Kegiatan pdpt untuk Sitarjo ada mitigasi bencana, penghijauan, konservasi penyu, KMP wisata alam, rabat beton, makadam jalan, pembibitan. Desa pesisir memang diharapkan menjadi daerah yang tangguh karena merupakan daerah vital karena dekat dengan pelabuhan sebagai pintu keluar masuk dan juga sebagai wilayah yang rawan bencana. Penguatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia adalah untuk mencapai hal tersebut agar menjadi wilayah yang tangguh.” (15 Desember 2015 di rumah Bapak Enggar Sitarjo)

Ini juga diamini oleh Ibu Ami Ratunnisa, S.Pi selaku staf Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Malang

“Hal pertama ketika yang sulit dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya siaga bencana. Untuk bina yang lain mudah karena bentuknya fasilitas yang mereka anggap menguntungkan sedangkan siaga bencana tidak. Padahal tiap tahun ada banjir.”(10 Oktober 2015, jam 11.00 di Kantor DKP Kabupaten Malang)

- 2) Tidak sinkronnya usulan kegiatan dari masyarakat dengan pemerintah desa. Seperti yang diungkap oleh Bapak Puji Hari Rinto selaku Tim Perencanaan Rowo Indah.

“Sulitnya waktu membuat usulan kegiatan selalu tidak sesuai dengan pendamping dan tim pemberdayaan desa, tim kita ingin membuat penerangan jalan tapi dari atas menganjurkan agar ada sinkronnya dengan mitigasi bencana jadi susah, maka itu kami bertemu dengan pak Kades untuk konsultasi.”(15 Desember 2015 jam 10.00 di Balai Desa Sitarjo)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Yang menjadi kepala desa Sitarjo saat ini adalah Lsipijanto Daud selaku Kepala Desa Sitarjo

“selama ini bencana di Sitarjo ada dari dusun Rowo, jadi saya arahkan ke sana supaya mudah koordinasinya. Tapi malah dusun lain gak mau ikut untuk siaga bencana, jadi waktu yang mengusulkan lampu penerangan jalan saya arahkan ke solarcell agar sesuai dengan bina siaga bencana”.(17 september 2015, jam 11.00 di Balai Desa).

C. PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang

a. Motivasi

PDPT mendorong masyarakat untuk terlibat langsung kegiatan pengembangan desa agar tangguh melalui lima bina. Bina yang diambil dalam penelitian ini adalah bina siaga bencana dan perubahan iklim. Desa Sitarjo merupakan desa yang terdampak langsung bencana banjir setiap tahun. Diperlukan pembenahan sistem siaga bencana yang terpadu antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Di dalam PDPT di bentuk kmp yang bisa menjadi wadah warga untuk bersama menangani masalah bencana.

Kelompok Masyarakat Pesisir dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. KMP yang ditetapkan dapat berupa kelompok masyarakat yang baru dibentuk atau kelompok masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya yang telah dievaluasi dan berkinerja baik.

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Sardiman (2006:73) motif merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Definisi Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Hamalik, 1992:173). Dalam Sardiman (2006:73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Melalui program PDPT ini pemerintah berusaha agar masyarakat mampu secara mandiri dan mampu memperbaiki masa depan. Dalam hal ini mampu menjadi masyarakat siaga bencana. Masyarakat desa Sitarjo pada awalnya tidak tertarik akan kegiatan siaga bencana. Motivasi mereka hanya berasar pada pembangunan bersifat fasilitas. Kelompok masyarakat pesisir siaga bencana baru terbentuk ketika ada bencana yang melebihi bencana sebelumnya jadi warga terpaksa ikut siaga bencana.

Lebih lanjut masyarakat desa Sitarjo sebelum ada program ini sudah ada beberapa kelompok sendiri. Kehadiran kelompok ini memudahkan dalam pembentukan KMP, jadi kelompok yang sudah ini dimasukan dalam kmp dan

kekurangan kelompok lain di bentuk oleh tim pendamping dan kepala desa. Tim pendamping memotivasi agar mempunyai kemampuan untuk siaga bencana. Tim pendamping bertugas untuk memotivasi kelompok atau KMP dari program PDPT agar mampu menjadi masyarakat siaga bencana baik itu di sumberdaya alam atau sumberdaya manusia.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (antara lain jalur evakuasi, *shelter*, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.

Masyarakat desa Sitiarjo semula menganggap bencana hal yang memang sudah takdir tanpa perlu melakukan pencegahan atau mitigasi bencana. Baru ketika hasil penangkapan ikan yang berdampak langsung pada penghasilan, masyarakat mulai berfikir bagaimana cara mengantisipasi terjadi bencana. Proses pemberdayaan oleh Kartasasmita (1996: 23) menyatakan bahwa dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini,

pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitakan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Ketika PDPT masuk maka hal pertama yang dilakukan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya siaga bencana. Setelah masyarakat mulai punya kesadaran tentang pentingnya siaga bencana membentuk kelompok yang dalam PDPT disebut KMP untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Kelompok tersebut harus secara mandiri melaksanakan dengan pengawasan dari tim pendamping dan juga pemerintah desa.

Menurut George D. Hadow dan Jane A. Bullock dalam Susanto (2006:11), proses mitigasi melibatkan pencegahan bencana agar jangan sampai terjadi bencana dan juga pengurangan dampak buruk akibat bencana yang sudah terjadi pada tahap minimal. Kebijakan mitigasi dalam manajemen bencana ini adalah sebuah kebijakan jangka panjang. Kebijakan mitigasi dapat bersifat struktural maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat deteksi aktifitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Sedangkan kebijakan non struktural

meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari resiko yang tidak perlu dan merusak kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun non struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi, dan mengurangi resiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peratauran yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang sesuai. Teknologi yang digunakan untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi resiko terjadinya bencana harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan di masa depan.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana di desa Sitiarjo melalui PDPT tidak ada pelatihan siaga bencana. Padahal dalam sarana dan prasarana yang ada di program ini sudah bagus dengan adanya jalur evakuasi, pengadaan HT, radio Rig, lampu *solarcell* dan pos pantau. Walaupun sarana untuk sistem peringatan dini bahaya bencana sudah ada tidak akan berfungsi tanpa ada keterampilan untuk menggunakan dengan benar.

c. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Penyaluran Dana BLM PDPT dilakukan secara langsung yaitu dari rekening KPPN ke rekening masing-masing KMP. Jumlah dana yang ditransfer ke rekening masing-masing KMP sesuai dengan RKK dan RAB yang telah disetujui oleh Tim Teknis

Daerah. Pencairan dana dilaksanakan oleh Pengurus inti masing-masing KMP di Bank BRI Sendangbiru-Malang Selatan. (Laporan akhir PDPT Kabupaten Malang : 72).

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, menurut Hutomo (2000 7-10) yaitu:

1. Bantuan Modal
Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tidak berdaya adalah pemodalan. Tidak adanya modal membuat masyarakat tidak mampu berbuat untuk diri sendiri dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan.
2. Bantuan pengembangan Prasarana
Usaha mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah dalam melakukan aktifitas.
3. Bantuan pendampingan
Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting, tugas utama pendamping adalah memfasilitasi prose belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.
4. Kelembagaan
Keberdayaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain itu mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam akses-akses yang diinginkan seperti pemodalan, media musyawarah, dan sebagainya.

Bantuan dana PDPT bersifat Bantuan Langsung Tunai (BLM) ke kelompok masyarakat langsung. Dana tersebut langsung diberikan ke KMP dengan monitor dari tim pendamping. Menurut klasifikasi kegiatan-kegiatan tersebut maka pemberdayaan siaga bencana langsung lewat KMP sudah melalui empat kegiatan menurut Hutomo (2000 7-10). Pertama bantuan modal melalui BLM langsung ke

KMP desa Sitiarjo dengan program PDPT, kedua bantuan prasarana melalui pembangunan pos pengawas, jalur evakuasi, dan pengadaan HT dan radio rig. Ketiga, bantuan pendamping melalui tim pendamping PDPT dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Keempat, bantuan kelembagaan dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Pesisir atau KMP untuk memberdayakan agar mandiri.

d. Pembangunan Dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Program PDPT Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang memerlukan sinergi jaringan antar lembaga. Banyak lembaga yang terkait mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Malang, Pemerintah desa Sitiarjo, tim pendamping, dan Kelompok Masyarakat Pesisir. Dan yang terlibat langsung dengan masyarakat adalah pemerintah desa, pendamping dan juga KMP.

Menurut klasifikasi kegiatan-kegiatan tersebut maka pemberdayaan siaga bencana langsung lewat KMP sudah melalui empat kegiatan menurut Hutomo (2000 7-10). Kegiatan kelembagaan memerlukan juga koneksi antar lembaga yang dalam KMP PDPT memiliki 10 kelompok. Dari 10 KMP diatas diperlukan sinergi karena bukan hanya kelompok siaga bencana yang punya tanggung jawab siaga bencana. Hampir semua kegiatan tersebut memiliki dampak untuk ketangguhan

terhadap bencana. Pembuatan tempat sampah permanen, penghijauan, dan makadam jalan bermuara pada siaga bencana.

Penanggulangan bencana juga didasarkan pada prinsip-prinsip praktis seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi dan non-proselitisi dalam Nurjanah (2012: 45-47). KMP menyusun rencana sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan desa untuk membentuk desa yang tangguh terhadap bencana. Usulan anggota berawal dari masalah mendesak yang dirumuskan dalam proposal setelah rapat anggota. Setelah dikoordinasikan dengan tim pendamping dan tim pemberdayaan desa untuk diusulkan dan dikoordinasikan dengan kelompok yang lain. Koordinasi diperlukan agar tidak ada usulan kegiatan yang tumpang tindih. Total ada 10 KMP yang ada di Desa Sitiarjo dengan anggota dari berbagai kalangan. Setiap usulan kegiatan, pendamping mengkoordinasikan dengan kelompok yang lain. Diharapkan tiap kegiatan kelompok saling mendukung dan saling menyambung agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dengan mudah. KMP merupakan bentuk hasil gotongroyong pemikiran dan tenaga masyarakat dalam usaha kemandirian terutama mengayasi masalah bencana. Maka dari itu kemitraan antar lembaga perlu dibangun agar program ini berhasil guna. Kegiatan kelompok perlu didorong agar melibatkan lembaga yang kompeten dalam bidang siaga bencana seperti Basarnas, PMI, dan BPBD.

Upaya untuk membentuk ketahanan masyarakat akan bencana wilayah pesisir adalah sebagai berikut (Anonim, 2012):

1. Mempromosikan kesadaran publik

Diperlukan membelajarkan publik, melalui bahan/alat komunikasi mitigasi, media massa, dan cara-cara lainnya, untuk dapat upaya-upaya perencanaan sampai pada masyarakat yang dilakukan secara periodik sehingga masyarakat tidak lengah, karena bencana datangnya selalu tiba-tiba. Kesiapsiagaan merupakan faktor kunci dari mitigasi bencana.

2. Memelihara perspektif yang komprehensif

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta instansi terkait perlu menjelaskan pada seluruh masyarakat untuk memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya.

3. Mengintegrasikan perencanaan mitigasi dengan proses pengambilan keputusan lokal.

Pemerintah daerah perlu menjamin semua nilai dan prioritas dari pelaku pembangunan untuk mengimplementasikan mitigasi bencana pada tiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

4. Melakukan analisis resiko masyarakat

Pemerintah daerah perlu memahami tingkat kerentanan masyarakat, seperti implikasi biaya, sumberdaya, dan kesempatan, yang berkenaan dengan bencana wilayah pesisir.

5. Menciptakan dan menggunkan jaringan sumberdaya mitigasi bencana

Pemerintah perlu memperbaiki akses akan informasi yang baik dan mengembangkan dan melaksanakan strategi mitigasi. Informasi ini termasuk

sumberdaya lokal, nasional, dan internasional, seperti penelitian, literatur, contoh kasus, spesialis, ahli lokal, dan metodolgi-metodologi yang berguna.

Semua strategi pemberdayaan yang dibahas diatas sesuai dengan upaya untuk membentuk ketahanan masyarakat akan bencana wilayah pesisir dengan memenuhi lima poin diatas.

2. Faktor yang Menghambat Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Wetan Kabupaten Malang

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang pemberdayaan siaga bencana. Masyarakat sudah menganggap bencana hal biasa yang tiap tahun terjadi, jadi pemberdayaan siaga bencana tidak penting. Diperlukan peran ekstra dari setiap *stakeholder* terkait. Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001) mengemukakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan akan banak ditentukan oleh individu-individu dalam menjalankan tugas yang diemban, sebab manusia merupakan pelaksana kegiatan dalam pencapaian tujuan. jika kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana masih rendah akan menghambat tercapai nya tujuan. Pembetulan kelompok masyarakat pesisir siaga bencana bertujuan masyarakat yang mampu secara mandiri tanggap bencana dan perubahan iklim di wilayah Sitarjo.

Bar-On (2000), mengemukakan kesadaran diri emosional adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri, memahami hal yang sedang

dirasakan dan mengetahui penyebabnya. Masyarakat sitiarjo perlu memahami potensi diri untuk menjadi masarakat siaga bencana. Pelatihan dan sosialisasi bahwa ada manajemen bencana untuk meminimalisir dampak dan juga siaga bencana. Peran penting pendamping, tim pemberdayaan desa dan tim ahli bencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam menumbuhkan kesadaran masarakat siaga bencana.

2. Tidak sinkronnya usulan kegiatan dari masyarakat dengan pemerintah desa. Karena ini adalah usulan warga yang beragam jadi kemungkinan ketidaksamaan usulan terjadi meskipun pemerintah desa hana sebagai pendamping. Model PDPT terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rencana pengembangan desa pesisir; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PDPT. Untuk RPDP dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan *top down* dan *buttom up*.

Pendekatan *top down* dengan memperhatikan perencanaan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, antara lain seperti Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, Rencana Zonasi WP3K di kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota, dan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota. Dalam pendekatan ini program PDPT Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui DKP Kabupaten Malang dibentuk agar rencana pemerintah bisa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui kelompok masyarakat

pesisir pemerintah berharap masyarakat mampu secara mandiri menguatkan desa Sitarjo akan ancaman bencana.

Selain pendekatan *top down*, PDPT ini juga menggunakan pendekatan *bottom up* dimana penyusunan profil dan rencana masyarakat desa berdasarkan masukan masyarakat hasil *Participation Rural Appraisal* (PRA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan Rencana Pengembangan Desa Pesisir. RPDP ini, kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengembangan desa pesisir, yang dapat meliputi: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima fokus pengembangan kegiatan yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumber Daya, Bina Manusia, dan Bina Usaha. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006). Partisipasi masyarakat adalah tonggak keberhasilan program ini, maka dari itu PDPT menekankan pada hasil usulan masyarakat. Usulan tersebut didapat dari diskusi dalam kelompok masyarakat dengan bimbingan dan

pengawasan dari tim pendamping. Program ini adalah program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, maka dari itu usulan kegiatan harus selaras dengan pedoman program PDPT bukan dengan rencana pembangunan desa sitiarjo karena sudah ada rencana masing-masing. Tim pemberdayaan desa bertugas untuk memfasilitasi usulan masyarakat bukan pembuat keputusan kegiatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Motivasi

Motivasi masyarakat sitiarjo mengenai siaga bencana masih kurang baik. Motivasi masyarakat terbatas pada pembangunan fasilitas. Masyarakat Sitiarjo sebelumnya sudah memiliki kelompok masyarakat yang memudahkan dalam sosialisasi program. Hanya untuk kegiatan siaga bencana masyarakat belum merasa termotivasi. Keadaan bahwa Sitiarjo rawan banjirlah yang mendesak masyarakat ikut dalam KMP siaga bencana.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan kemampuan

Pada peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan mengenai KMP PDPT bina siaga bencana berjalan kurang baik. Masyarakat belum menganggap penting siaga bencana dan hal ini diperparah tanpa adanya pelatihan simulasi tanggap bencana. Dalam mitigasi bencana dibutuhkan pelatihan agar masyarakat tahu apa yang dilakukan ketika bencana datang. Sebagus apapun sarana siaga bencana tanpa ada yang mengerti cara memanfaatkan tentu akan percuma.

3. Mobilisasi sumberdaya.

Proses mobilisasi sumberdaya dalam program PDPT bina siaga bencana di Desa Sitiarjo sudah berjalan baik. Masyarakat melaksanakan kegiatan KMP melalui dana langsung dari pemerintah berupa BLM atas usulan sendiri. Ketika ada kekurangan maka dana tersebut ditambah dari dana swadaya masyarakat.

4. Pembangunan dan pengembangan Jejaring.

Pembangunan dan pengembangan jejaring antar kelompok masyarakat pesisir dalam mendukung terciptanya desa tangguh siaga bencana berjalan baik. Setiap KMP dalam melaksanakan kegiatan PDPT harus saling komunikasi agar kegiatan. Itu tercermin dalam kegiatan mereka yang berbeda tapi tetap mendukung kegiatan siaga bencana

5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat kegiatan PDPT melalui kelompok masyarakat untuk menjadikan masyarakat siaga bencana adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya siaga bencana dan tidak sinkronnya usulan dari bawah ke atas.

B. Saran

Peneliti memiliki saran yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan siaga bencana PDPT di desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, diantaranya adalah:

1. Tim pendamping dan tim pemberdayaan desa harus bisa mensosialisasikan bahwa pembangunan bukan hanya terbatas fasilitas. Juga harus mampu memotivasi masyarakat bahwa pembangunan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan terutama pemberdayaan siaga bencana. Dengan begitu masyarakat akan mempunyai motivasi tersendiri untuk ikut dalam kegiatan siaga bencana.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan kemampuan kelompok masyarakat pesisir perlu terus diadakan mengenai dampak dan pencegahan bencana. Pelatihan tentang simulasi harus dilaksanakan untuk mencapai masyarakat siaga bencana. Dengan pelatihan kemampuan masyarakat akan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana siaga bencana yang telah dibangun.
3. Proses pengelolaan dana kegiatan sudah berlangsung baik, tapi tetap harus ada pembekalan bagaimana keberlanjutan agar ketika program sudah berakhir, kegiatan masih tetap berlanjut melalui dana swadaya masyarakat.
4. Pengembangan jaringan juga harus tetap ditingkatkan untuk keberlanjutan kegiatan secara mandiri. Jadi ketika program berakhir KMP yang sudah ada tidak bubar dan agar tetap saling berinteraksi untuk membentuk desa tangguh bencana.
5. Dilakukan sosialisasi dari tim ahli bencana dalam hal ini BPBD Kabupaten Malang. Tim pendamping perlu berkerja sama dengan

BPBD dalam proses sosialisasi pentingnya manajemen bencana sebelum membentuk KMP.

6. Tim pendamping dan tim pemberdayaan desa harus bisa menampung dan mengarahkan usulan kegiatan kelompok masyarakat sesuai dengan program PDPT bina siaga bencana.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Buku Ajar Pengelolaan Pesisir Dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Malang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UB
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bengen, Dietrich G. 2001. *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB
- Harbani Pasolong, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hasniati, 2008. *Manajemen Bencana: Sebuah Upaya Untuk meminimalisi Dampak Bencana*. Jurnal Administrasi Negara Vol.X No.2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW
- Huberman, Miles. 2014. *Qualitative data analysis*. United States of America: SAGE Publications. Inc.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Pengembangan Desa Pesisir Tangguh*. Diakses melalui <http://www.pdpt-kkp.org> (27/04/2015)
- Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humaniora
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, cetakan kedua, BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2014 Kementrian Kelautan dan Perikanan
- Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.
- Pranarka, A.M.W dan Onni S.Prijono, 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Pranoto, Sugimin. 2007. *Sejarah Pembangunan Pemukiman Pedesaan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Priambodo, S Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius
- Profil Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang 2013. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
- RAN PB *Rencana Antisipasi Nasional Penanggulangan Bencana* edisi 2006-2009.

- Rudyanto, Arifin. 2004. *Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*. Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFC, 22 September 2004
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Interview Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S, Kausar A. 2008. *Manajemen Bencana. Jurnal Administrasi Negara* Vol.X No.2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW
- Sairin, Sjafitri. 2001. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia (Dalam Perspektif Antropologi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekarwati, Dr. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan; Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sardiman, A.M. 2006. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grafindo
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. 2013. *Sosialisasi Program PDPT*. Diakses melalui <http://www.kelautan.malangkab.go.id> (27/04/2015)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat JPS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Susanto, A.B. 2006. *Disaster Management Di Negara Rawan Bencana*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopaadidjaya AR. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES

Interview Guide

1. Bagaimana tahap sosialisasi pemberdayaan melalui pdpt?
2. Bagaimana mendorong masyarakat untuk ikut serta dan membentuk kelompok masyarakat?
3. Bagaimana pelatihan siaga bencana kepada masyarakat melalui pdpt?
4. Bagaimana kelompok masyarakat memilih pemimpin dalam pelaksanaan pemberdayaan siaga bencana?
5. Bagaimana mobilisasi sumberdaya baik dari tim pendamping maupun kelompok masyarakat?
6. Bagaimana pengembangan jaringan kelompok masyarakat?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan siaga bencana?



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
 MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 367 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 No.9909 /UN10.3/PA/2015 Tanggal 7 Juli 2015 Perihal : Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Survey** oleh :

Nama / Instansi : Khoirul Ikhwani / Mhs. Jurusan Administrasi Publik
 Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
 Tema/Judul/Survey/Research : Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui
 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)
 (Studi di Desa Sitiarjo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab.
 Malang
 Daerah/tempat kegiatan : Desa Sitiarjo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang
 Lamanya : 27 Juli-25 September 2015
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
 Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 09 Juli 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG
 Kab. Sumbermanjing Wetan dan Wasbang
 KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 Budianto Hermawan.SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Malang
4. Sdr. Camat Sumbermanjing Wetan Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Desa Sitiarjo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang
6. Sdr. Mhs. Ybs
7. Arsip



Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor/PER-DJKP3K/2014~~04~~/~~KP3K~~/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun ~~2012~~2014.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; (2) tingginya kerusakan sumber daya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir.

Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, yaitu Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh mempunyai makna strategis yaitu: **pertama**, merupakan implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan **kedua**, Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan wujud dari intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya pesisir.

Pada tahun 2014 kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh telah memasuki pelaksanaan tahun ke-3 untuk 16 kabupaten/kota, dan tahun ke-2 untuk 6 kabupaten sehingga kegiatan diarahkan untuk mewujudkan ketangguhan dan kemandirian desa.

B. Tujuan

Tujuan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tujuan Umum yang merupakan adopsi dari tujuan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan serta tujuan khusus sebagai turunan dari tujuan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan.

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha masyarakat pesisir, dan meningkatnya kualitas lingkungan.

Comment [G1]: Dihilangkan diganti PDPT krn diatas sudah ada singkatannya

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus PDPT adalah:

- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir;
- Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat desa dengan melibatkan peran serta perempuan; dan

Comment [G2]: Dihilangkan diganti PDPT krn diatas sudah ada singkatannya

- d. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan Pengembangan Desa Pesisir yang Tangguh di ~~6648~~ (enam puluh enamempat puluh delapan) desa pesisir di ~~2216~~ kabupaten/kota.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan terhadap kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini terdiri dari indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Indikator *output* umum:

Indikator *output* kegiatan PDPT 2014 dituangkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indikator *Output* umum

Kelompok Indikator	Nama Indikator Kinerja Output	Target Tahun 2014
Pemanfaat	1. Jumlah Kelompok	330 KMP
	2. Jumlah Kab/Kota	22 kabupaten/kota
	3. Jumlah Anggota Kelompok	1650 orang
Partisipasi Umum	4. Jumlah Tenaga Pendamping dan Motivator Desa	220 orang
	5. Prosentase jumlah masyarakat hampir miskin yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	60%
	6. Jumlah pertemuan/koordinasi SKPD dengan TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota	Minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Kualitas Ouput	7. Ketepatan waktu penyaluran BLM	100% pada bulan September
	8. Prosentase pemanfaatan BLM yang sesuai dengan RKK dan dimanfaatkan	100%
	9. Prosentase sarana/ prasarana yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam RKK	100%
	10. Prosentase sarana dan prasarana yang dibangun masih berfungsi	100%
Penguatan Kapasitas	11. Prosentase jumlah anggota kelompok yang dilatih/diberikan bimtek dibandingkan dengan total anggota kelompok	10%
	12. Persentase jumlah kelompok yang dibina oleh Tenaga Pendamping dalam menyusun RKK memperhatikan RPDP/RPJM Desa	100%
Tata Kelola yang baik	13. Persentase kepemilikan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP	100%
	14. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total pengaduan	75%
	15. Frekwensi pelaporan perkembangan pelaksanaan dan hasil program di website program/ Pemda	Triwulan
Gender	16. Prosentase rata-rata anggota kelompok perempuan dibandingkan dengan total anggota kelompok penerima	10%

	17. Prosentase jumlah Tenaga Pendamping dan/atau Kader Desa perempuan dibandingkan dengan total	30%
	18. Prosentase jumlah kehadiran peserta perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan	10%
	19. Prosentase usulan peserta perempuan dibanding dengan total usulan	10%
Dukungan Pemda	20. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan	50% dari jumlah kabupaten/kota pelaksana PDPT

2. Indikator output khusus

- tersedianya dokumen ~~R~~encana ~~P~~engembangan ~~d~~Desa Pesisir di 66 desa Pesisir di 22 Kab/Kota yang telah dikaji ulang;
- terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di ~~48-66~~ desa pesisir dan pulau-pulau kecil di ~~16-22~~ kabupaten/kota;
- terlaksananya kegiatan lokakarya Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di ~~16-22~~ kabupaten/kota dalam rangka penyampaian laporan kegiatan;
- tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat ke Kelompok Masyarakat Pesisir di ~~48-66~~ desa pesisir dan pulau-pulau kecil di ~~16-22~~ kabupaten/kota; dan
- terbangunnya sarana dan/atau prasarana sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan pada ~~48-66~~ desa pesisir di ~~16-22~~ kabupaten/kota.

Comment [G3]: Perluah dicantumkan?
Mengingat ini bukan target pokok PDPT

3. Indikator outcome: meningkatnya kualitas lingkungan di dalam kelompok mandiri.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disebut PDPT adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim.
4. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUKP adalah kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah/pemasar ikan, kelompok usaha garam rakyat dan Kelompok Masyarakat Pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
5. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUKP dalam bentuk bantuan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta bantuan sarana dan prasarana pesisir.
6. Rencana Pengembangan Desa Pesisir yang selanjutnya disebut RPDP adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan desa selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Desa dibantu fasilitator secara partisipatif di tiap-tiap desa dengan mempertimbangkan antara lain seperti profil desa pesisir,

musyawarah perencanaan dan pengembangan desa (musrenbangdes), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), dan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi rinci kabupaten/kota.

7. Rencana Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disebut RKK adalah rencana kegiatan untuk pengembangan ketangguhan desa pesisir yang disusun oleh Kelompok Masyarakat Pesisir [KUKP](#) berdasarkan rencana pengembangan desa.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut KMP adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.
10. Tim Koordinasi adalah Tim PNPM Mandiri KP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP.
11. Tim Teknis adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.
12. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha di pesisir ataupun usaha lainnya serta kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan.
13. Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri KP.

14. Fasilitator adalah orang yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan atau kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan memfasilitasi kegiatan penyusunan RPDP atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat desa.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
17. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
18. Lokasi PDPT tahun ke-3 adalah lokasi pelaksanaan PDPT yang pada tahun 2014 memasuki tahun ketiga.
- 17.19. Lokasi PDPT tahun ke-2 adalah lokasi pelaksanaan PDPT tambahan pada tahun kedua.
- 18.20. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- 19.21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
- 20.22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
- 21.23. Papan informasi adalah media yang berisikan informasi tentang lokasi, nama kelompok, jumlah BLM yang

diterima, pemanfaatan BLM, dan dilengkapi dengan logo PNPM Mandiri dan logo KKP.

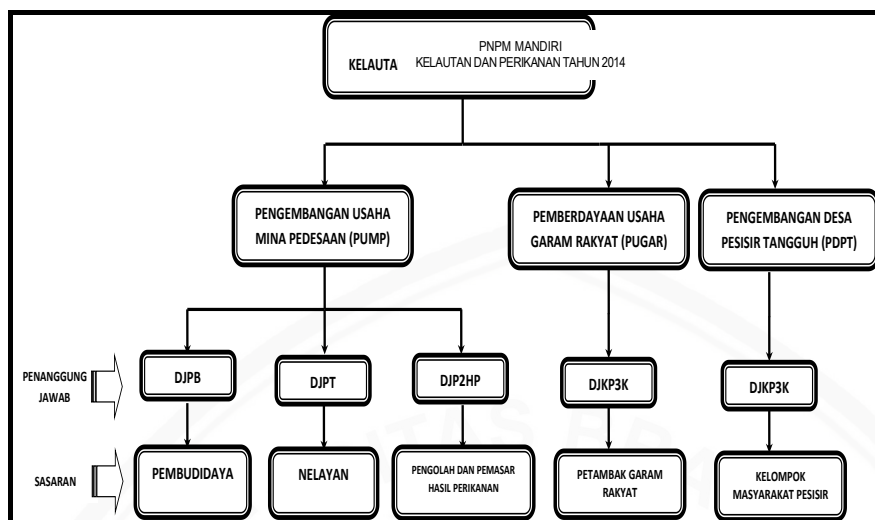
- | 22.24. Hampir Miskin (BPS 2011) adalah masyarakat dengan pengeluaran perbulan per kepala Rp. 233.740 sampai dengan Rp. 350.610, atau antara Rp. 7.780 sampai dengan Rp. 9.350 per orang per hari.
- | 23.25. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. (Bappenas, Percepatan PUG 2012)
- | 24.26. Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II

PERSIAPAN

A. Mekanisme PNPM Mandiri KP Tahun ~~2012~~2014

Dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi program prioritas pemerintah, maka sejak tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PNPM Mandiri-KP melaksanakan program penanggulangan kemiskinan utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Pada tahun ~~2012~~2014 pelaksanaan PNPM Mandiri-KP terdiri dari Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). PUMP merupakan program pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat nelayan, pembudidaya serta pengolah dan pemasar hasil perikanan. Sedangkan PUGAR adalah kegiatan pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam dalam rangka mencapai Swasembada Garam Nasional. Adapun PDPT adalah kegiatan pembangunan wilayah desa pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesiapan terhadap bencana dan perubahan iklim.



Gambar 1. PNPM Mandiri-KP Tahun 2014²

B. Model Pengembangan PDPT

Model PDPT terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rencana pengembangan desa pesisir; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PDPT. Untuk RPDP dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan *top down* dan *bottom up*.

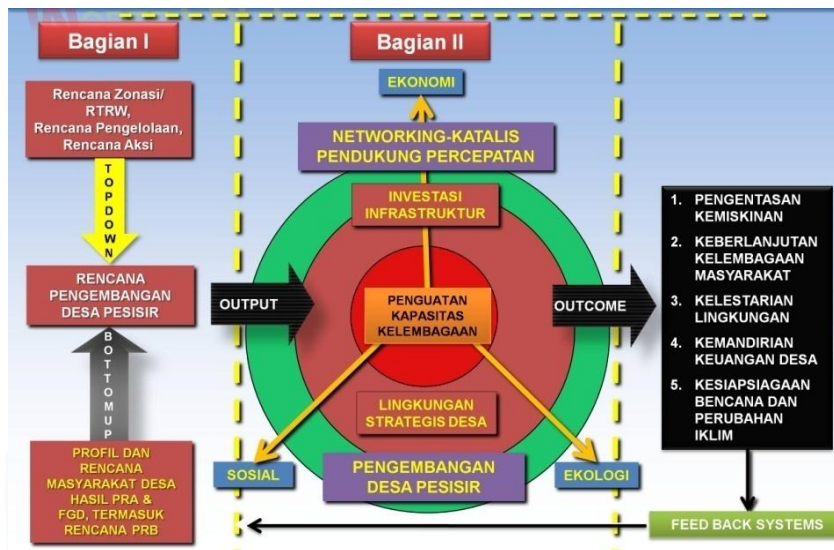
Pendekatan *top down* dengan memperhatikan perencanaan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, antara lain seperti Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, Rencana Zonasi WP3K di kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota, dan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K di kabupaten/kota.

Selain pendekatan *top down*, PDPT ini juga menggunakan pendekatan *bottom up* dimana penyusunan profil dan rencana masyarakat desa berdasarkan masukan masyarakat hasil *Participation Rural Appraisal* (PRA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan **Rencana Pengembangan Desa Pesisir**. RPDP ini, kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengembangan desa pesisir, yang dapat meliputi: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima fokus pengembangan kegiatan yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumber Daya, Bina Manusia, dan Bina Usaha.

Dari ketiga aspek yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya muatan PDPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumber daya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di desa-desa pesisir.

Dengan demikian, muara model PDPT adalah terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, dan

kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Ilustrasi singkat dari penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

C. Lokasi Kegiatan

PDPT pada tahun 2014 ini dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota, terdapat 16 Kabupaten/Kota memasuki tahun ke-3 pelaksanaan kegiatan dan 6 Kabupaten/Kota memasuki tahun ke-2 pelaksanaan kegiatan.

Lokasi PDPT tahun ke-3 terdiri atas:

1. Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
2. Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Comment [G4]: diganti atas

7. Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
10. Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
11. Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta;
12. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
13. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
14. Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
15. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; dan
16. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi PDPT tahun ke-2 terdiri atas:

1. Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
4. Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
5. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; dan
6. Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Comment [G5]: diganti atas

D. Pemilihan Desa Pesisir

Pelaksana kegiatan PDPT Tahun 2014² adalah 22 kab/kota. Pemilihan desa pesisir dilakukan dengan memenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

1. lokasi rawan bencana dan perubahan iklim;
2. mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan;
3. masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya;
4. kondisi lingkungan permukiman kumuh;
5. terjadi degradasi lingkungan pesisir; dan/atau
6. tingkat pelayanan dasar rendah.

Selanjutnya desa pesisir tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. . Pelaksanaan PDPT tahun 2014 berlokasi di desa-desa pesisir yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya melalui keputusan bupati/walikota.

BAB III

PERENCANAAN

A. Fokus Kegiatan

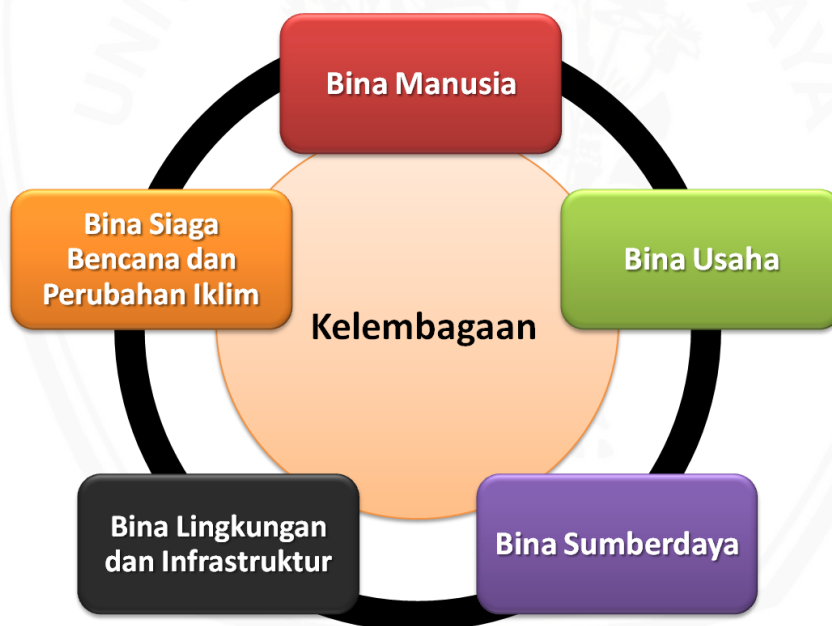
PDPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada *coastal resilient village ~~community~~* dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh.

Desa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Pengetahuan masyarakat desa pesisir tentang bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, serta rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Desa pesisir juga rentan secara lingkungan dan fisik. Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi listrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat bencana maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di pesisir secara umum telah mengalami kerusakan.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan ketangguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud disajikan pada Gambar 4.

Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Bina Manusia**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif;



Gambar 4. Fokus Pengembangan Kegiatan PDPT

2. **Bina Usaha**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi.

Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal;

3. **Bina Sumber Daya**, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan *monitoring, controlling and surveillance* dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya;
4. **Bina Lingkungan atau Infrastruktur**, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya;
5. **Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim**, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (antara lain jalur evakuasi, *shelter*, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.

Keberhasilan program kelima fokus pengembangan kegiatan sebagaimana tersebut di atas sangat tergantung peran aktif kelembagaan desa sehingga penguatan kelembagaan sangat perlu ditingkatkan.

Comment [G6]: Sebaiknya tidak perlu ditulis demikian kecuali dijadikan sebagai fokus bina yang keenam

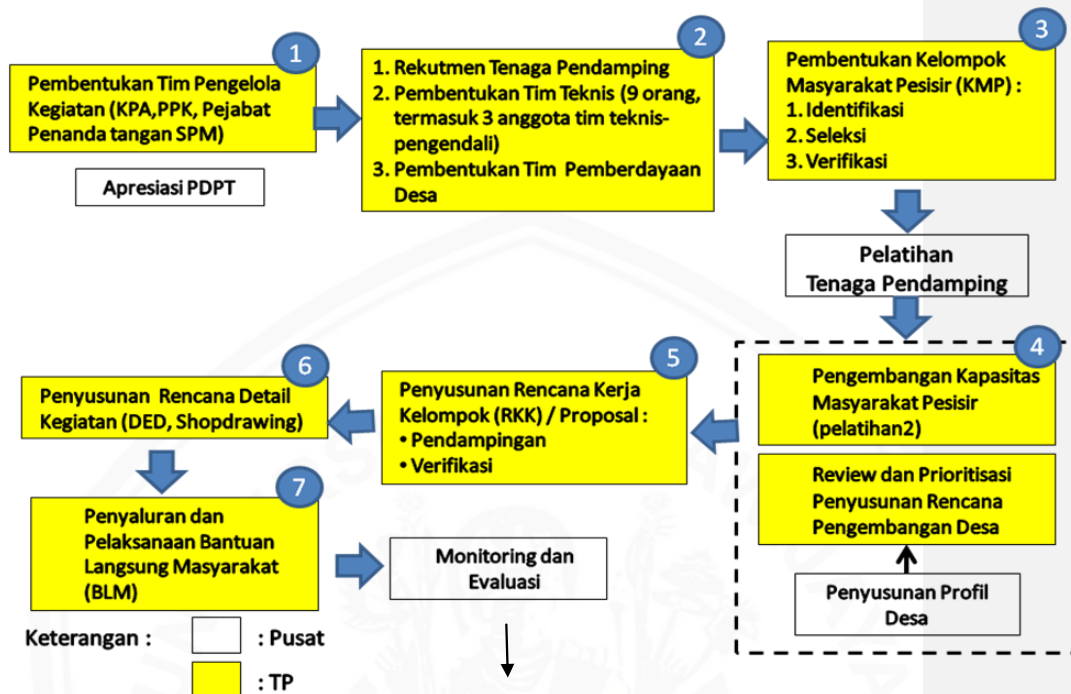
B. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pelaksanaan PDPT tahun 2014 di daerah melalui Tugas Pembantuan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pusat.

Tahapan pelaksanaan kegiatan PDPT mengadopsi siklus konsep *Integrated Coastal Management* dimana memiliki konsep keterpaduan dan berkelanjutan dalam mengelola kegiatan mulai dari tahapan identifikasi hingga evaluasi (penyusunan laporan).

Tahapan lokasi PDPT meliputi 8 (delapan) tahapan sebagaimana dijelaskan pada gambar 5.





Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan PDPT

Tahap pertama kegiatan PDPT ~~tahun—2012~~ adalah pembentukan pengelola kegiatan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM.

Pada **tahap kedua**, untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan PDPT di lapangan, maka perlu dilakukan evaluasi dan penetapan kembali atau rekrutmen Tenaga Pendamping sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Koordinator di tiap kabupaten/kota dan 3 orang Tenaga Pendamping yang bertugas di tiga desa. Review atau rekrutmen dan penetapan dilakukan oleh Kepala Dinas yang terlebih dahulu mendapat verifikasi dari Ditjen KP3K. Selanjutnya ~~Selanjutnya~~ tenaga pendamping ~~tersebut~~ akan mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen KP3K.

Pembentukan Tim Teknis yang beranggotakan 9 orang berasal dari SKPD terkait di tingkat kabupaten/kota atau paling banyak

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Justified, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

12 orang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Tim Teknis terdiri dari 1 orang sebagai ketua (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota), 1 orang sebagai sekretaris (Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan Perikanan), 3 orang Sub Tim Teknis dan selebihnya sebagai anggota. Selanjutnya Kepala Dinas membentuk Tim Pemberdayaan Desa yang beranggotakan 3 orang terdiri dari 1 orang kepala desa / lurah dan 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berasal dari masyarakat sebagai motivator desa.

Tahap ketiga, melakukan review atau prioritisasi Rencana Pengembangan Desa (RPDP) berdasarkan permasalahan yang berkembang atau kebutuhan yang mendesak di lapangan. RPDP, dengan mempertimbangkan Profil Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).. Proses penyusunan RPDP ini dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah ~~Pembangunan Desa~~ a. (Musrenbang Des). Perubahan RPDP ini ditetapkan kembali melalui Peraturan Desa. Lebih lanjut, proses penyusunan RPDP mengacu pada panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir sebagaimana Lampiran II. Adapun penyusunan Profil Desa disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Profil Desa pada Lampiran V

Tahap keempat, terdiri atas dua kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu (i) Penetapan KMP. KMP yang ditetapkan diprioritaskan KMP lama yang memiliki kinerja baik berdasarkan hasil evaluasi dan apabila berdasarkan hasil evaluasi KMP lama tidak memenuhi syarat maka dapat dibentuk KMP baru. Untuk KMP pelaksana bina usaha bisa ditetapkan kembali untuk kegiatan bina yang berbeda. Proses penetapan KMP dijelaskan pada bab berikutnya, serta (ii) pengembangan kapasitas masyarakat desa pesisir melalui pelatihan-pelatihan.

Tahap kelima, penyusunan RKK oleh KMP yang didampingi oleh Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping. Penyusunan RKK harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa pada Dokumen RPDP. Proses penyusunan dan pengajuan serta penetapan RKK akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Tahap keenam, penyusunan Rencana Detail Kegiatan merupakan bagian dari penyusunan RKK. Dokumen Rencana

Comment [G7]: mohon masukan efektivitas tim teknis ini, apakah benar bekerja atau hanya unsur DKP saja yg bekerja. Klo demikian lebih baik dikurangi jml orgnya dan pagunya bisa dialokasikan ke keg lain

Detail Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proposal RKK dalam pengajuan BLM.

Tahap ketujuh, Penyaluran dan Pelaksanaan BLM dilakukan setelah Proposal RKK beserta kelengkapan dokumen administrasi telah lolos verifikasi ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan BLM oleh KMP dengan didampingi Tenaga Pendamping dan Tim Pemberdayaan Desa, agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, *output* dan target kegiatan.

Tahap kedelapan, lokakarya PDPT di daerah yang bertujuan untuk memaparkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang serta mendorong sinergitas lingkup kabupaten/kota dalam upaya optimalisasi pelaksanaan PDPT serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan PDPT secara keseluruhan. Lokakarya PDPT selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan pada akhir bulan oktober pada seluruh kabupaten/kota pelaksana PDPT.

C. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan PDPT didasarkan pada teori *Community Driven Development* (CDD) yang merupakan perencanaan partisipatif yang diikuti oleh masyarakat desa secara utuh diawali dengan sosialisasi, identifikasi, pemetaan masalah, pengorganisasian kelompok/perencanaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi secara bersama dalam kelompok.

Terdapat 6 (enam) elemen pemberdayaan yang harus diacu dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PDPT, yakni:

1. Fasilitasi/Pendampingan

Fasilitasi PDPT dilakukan oleh Tenaga Pendamping mulai dari (a) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (b) memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun RKK, (c) melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen kegiatan, dan (d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Partisipasi Komunitas

Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan difasilitasi Tenaga Pendamping berpartisipasi menyusun RKK sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok dengan memperhatikan perencanaan desa.

Dari sisi pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

3. Pengorganisasian Kelompok

KMP yang telah terbentuk diharapkan memperoleh penguatan pengelolaan kelembagaan, kelompok, manajemen pengelolaan keuangan, dan bimbingan teknis kegiatan.

4. Transparansi

KMP menyediakan Papan Informasi penerima PNPM Mandiri KP di lokasi kegiatan, yang sekurang-kurangnya memuat besarnya jumlah dana BLM dan jenis kegiatannya.

Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh Tenaga Pendamping dilakukan melalui laporan kepada Kepala Dinas.

5. Sistem Pengawasan

Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok.

6. Perspektif Gender

Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta perempuan dan kaum rentan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping.

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan PDPT dapat dilihat pada jadwal di bawah ini :

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PDPT 2014

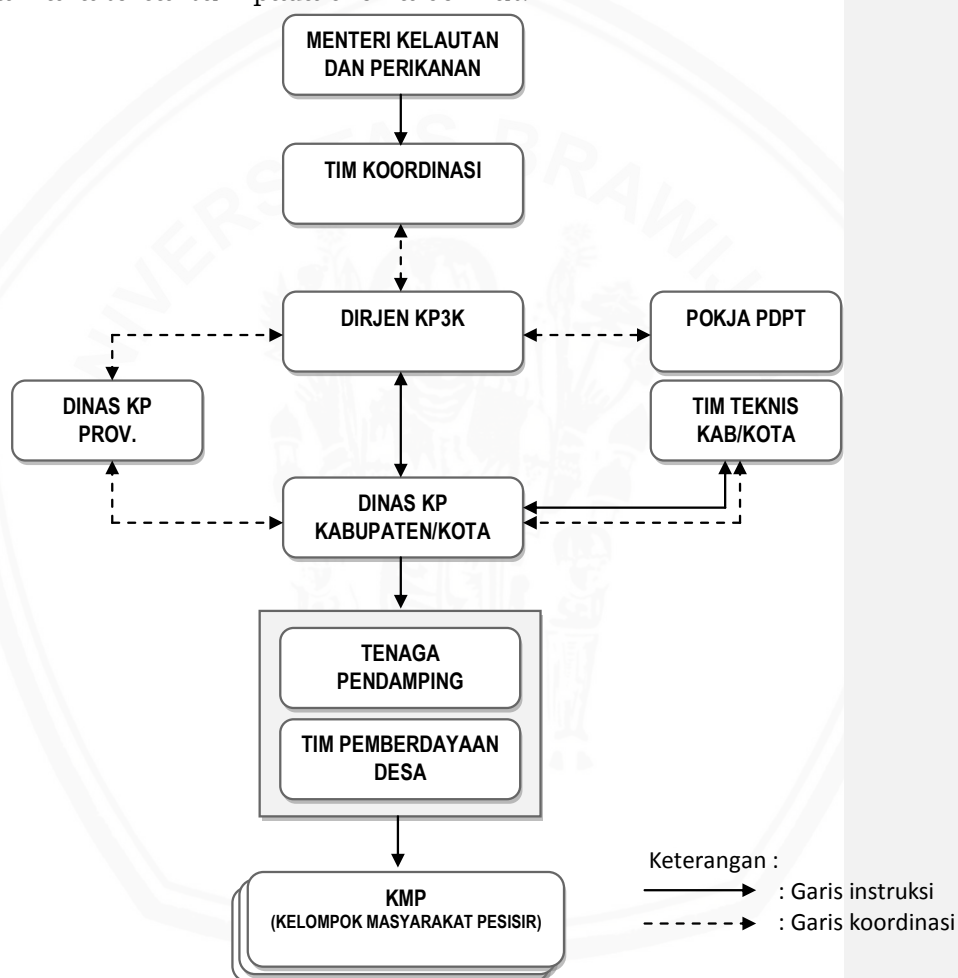
No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Pengelola Kegiatan PDPT (SK KPA, PPK, Tim Teknis, dll)												
2	Rekrutmen Tenaga Pendamping												
3	Pelatihan Tenaga Pendamping												
4	Review Rencana Pengembangan Desa Pesisir												
5	Peningkatan kapasitas masyarakat desa												
6	Review, identifikasi, dan verifikasi KMP												
7	Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) oleh KMP												
8	Penyaluran BLM												
9	Pelaksanaan BLM												
10	Bimbingan Teknis												
11	Lokakarya Daerah PDPT												
12	Lokakarya Nasional PDPT												
13	Monitoring dan evaluasi												



BAB IV PELAKSANAAN

A. Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Kegiatan

Kelembagaan pelaksanaan program PDPT secara keseluruhan sebagaimana tercantum pada skema berikut:



Gambar 3. Struktur organisasi pelaksanaan program PDPT

Kelembagaan PDPT terdiri atas:

1. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan lintas Kementerian/Lembaga. Tim Koordinasi terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaannya Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk sekretariat. Tugas Tim Koordinasi, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan umum;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP;
- c. melakukan sosialisasi pengembangan PNPM Mandiri KP;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan PNPM Mandiri KP Lingkup KKP; dan
- e. melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian.

2. Pokja PDPT

Pokja PDPT dibentuk oleh Direktur Jenderal KP3K pada tingkat nasional. Pokja PDPT bertugas:

- a. Memberikan pembinaan / pembimbingan / pengarahan / saran / bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan PDPT;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar Kementerian / Lembaga terkait PDPT;
- c. Merekomendasikan kebijakan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PDPT; dan
- d. Hal lain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PDPT.

3. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Jenderal KP3K membentuk Pokja PDPT yang unsur-unsurnya terdiri dari eselon I lingkup KKP terkait dan kementerian/lembaga terkait serta provinsi. Adapun tugas Direktorat Jenderal KP3K adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi pengendalian;
- b. menyusun pedoman teknis PDPT;
- c. melaksanakan sosialisasi;

- d. melaksanakan bimbingan teknis;
- e. pelatihan tenaga pendamping, motivator, dan pelaksana kegiatan PDPT; dan
- f. Melaksanakan Lokakarya PDPT di tingkat nasional.

4. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan PDPT bertugas :

- a. Memberikan pembinaan/pembimbingan/pengarahan/saran /bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan PDPT di kabupaten/kota;
- b. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar SKPD dan stakeholder terkait lingkup provinsi;
- b.c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDPT di Kabupaten/ Kota pelaksana PDPT;
- e.d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan PDPT provinsi kepada Dirjen KP3K;
- d.e. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.
- e.f. Merekomendasikan kebijakan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PDPT; dan
- f.g. Memberikan saran / bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan PDPT kepada Dirjen KP3K; dan
- g.h. Hal lain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PDPT.

Formatted: Font: Bookman Old Style

5. Tim Teknis

Untuk kelancaran koordinasi PDPT di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis berdasarkan SK Bupati atau Walikota, diketuai oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris dari Dinas (yang membidangi Kelautan dan Perikanan) dan beranggotakan SKPD terkait lainnya dan Camat. Unsur dari Bappeda, Dinas (yang membidangi Kelautan dan Perikanan), dan Dinas Pekerjaan Umum merangkap sebagai Sub Tim Teknis yang melaksanakan verifikasi.

Tim Teknis bertugas :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan prioritas berkaitan dengan aspek manusia, usaha, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, bencana dan perubahan iklim, serta kelembagaan desa sasaran;
- b. Memberikan pembinaan/pembimbingan/pengarahan/saran/bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/lapangan;
- c. Merekomendasikan kebijakan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PDPT;
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.
- e. Melakukan verifikasi calon KMP dan RKK KMP; dan
- f. Melakukan inventarisasi kontribusi pemerintah daerah / institusi lainnya dalam bentuk kegiatan, *inkind*, dan/atau anggaran dalam pendanaan program
- g. Hal lain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PDPT di Daerah.

6. Dinas Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan PDPT, Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PDPT serta melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait melalui Tim Teknis;
- b. Melakukan sosialisasi, publikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyeleksi, memverifikasi dan menetapkan KMP, Tenaga Pendamping, Tim Pemberdayaan Desa;
- d. Menyusun kontrak kerja dengan tenaga pendamping dan Tim Pemberdayaan Desa;

- e. Menyeleksi, memverifikasi dan menetapkan proposal RKK yang disusun oleh KMP;
- f. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.
- g. Mengajukan usulan proposal kegiatan PDPT tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Kepala Dinas Provinsi; dan
- g.h. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan kepada Dirjen KP3K dan ditembuskan ke Dinas Propinsi.

Panduan mengenai Dokumentasi dan Publikasi dapat dilihat pada Lampiran IV.

7. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PDPT terdiri atas 4 (empat) orang yang salah satunya ditunjuk sebagai koordinator, diutamakan berkinerja baik serta berpengalaman dalam kegiatan pendampingan pada program pemberdayaan masyarakat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) tenaga pendamping berjenis kelamin perempuan yang selanjutnya ~~dibentuk dan~~ ditetapkan melalui SK oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kontrak Kerja. - Kontrak kerja Tenaga Pendamping disusun oleh Kepala Dinas. Tugas Tenaga Pendamping meliputi:

- a. Bersama dengan tim pemberdayaan membantu Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja terhadap KMP tahun 2012;
- b. Melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon KMP dan proposal kelompok masyarakat (RKK);
- c. Mengusulkan hasil verifikasi calon KMP penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui koordinator;
- d. Membantu penyusunan RPDP;
- ~~d.e.~~ Melakukan prioritasasi kegiatan sesuai dengan dokumen RPDP yang telah ada;

- e-f. Mendampingi KMP untuk pencairan BLM dan pelaksanaan kegiatan;
- f-g. Melaporkan hasil kegiatan KMP kepada Dinas Kabupaten/Kota melalui koordinator;
- g-h. Berkoordinasi dengan Fasilitator PNPM Mandiri Inti terkait dengan integrasi perencanaan pada forum musrenbangdes;
- h-i. [Melakukan pendampingan dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa;](#)
- i-j. Melakukan konsultasi dengan tenaga penyuluh perikanan KKP; dan
- j-k. Khusus untuk koordinator, bertugas untuk menyusun rencana kerja tenaga pendamping sampai dengan akhir tahun, mengkoordinasikan semua kegiatan tenaga pendamping, dan mengkompilasi laporan dari tenaga pendamping, serta membuat laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- k-l. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil program di website program/pemerintah daerah

Tugas tenaga pendamping tersebut dituangkan dalam kontrak kerja.

Kualifikasi tenaga pendamping mempunyai pendidikan DIII / S1, dan berpengalaman dalam kegiatan pendampingan pada program pemberdayaan masyarakat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

[Dalam hal penggantian/perubahan tenaga pendamping oleh Kepala Dinas di masing-masing kabupaten/kota maka pengelola PDPT tingkat kabupaten/kota wajib membuat SK Kepala Dinas tentang Perubahan tenaga pendamping dan melaporkan ke Dirjen KP3K.](#)

8. Tim Pemberdayaan Desa

Tim Pemberdayaan Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tim ini terdiri dari 3 (tiga) orang, terdiri atas Kepala Desa /Lurah, 1 (satu) orang motivator desa laki-laki, dan 1 (satu) orang motivator desa perempuan. Tim Pemberdayaan Desa bertugas untuk:

- a. Melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon KMP dan RKK ~~propos~~al-masyarakat;
- b. Mengusulkan hasil verifikasi calon KMP penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota c.q. Tenaga Pendamping;
- c. Melakukan sosialisasi hasil penetapan kelompok masyarakat penerima;
- d. Membantu kegiatan PDPT di tingkat desa;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Membuat laporan perkembangan dan aktivitas pelaksanaan PDPT di tingkat desa, sesuai dengan format terlampir (formulir 16)

9. Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP)

Kelompok Masyarakat Pesisir dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. KMP yang ditetapkan dapat berupa kelompok masyarakat yang baru dibentuk atau kelompok masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya yang telah dievaluasi dan berkinerja baik. Penetapan KMP akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya.

KMP bertugas untuk:

- a. Menyusun Rencana Kerja Kelompok sesuai dengan kebutuhan desa yang tertuang dalam RPDP
- b. Melengkapi data-data administrasi untuk pengajuan BLM
- c. Membelanjakan dana BLM sesuai dengan RKK yang telah disusun dan disetujui oleh KPA
- d. Membuat pembukuan keuangan sederhana terkait belanja BLM PDPT

- e. Membuat laporan pemanfaatan BLM PDPT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

B. Penyusunan/review RPDP

RPDP dilaksanakan secara partisipatif di tiap-tiap desa melalui pendampingan dengan mempertimbangkan antara lain profil desa pesisir, hasil musyawarah perencanaan pengembangan desa (musrenbangdes), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), dan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi rinci kabupaten/kota. RPDP merupakan dasar pelaksanaan pengembangan desa pesisir selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala desa.

Kegiatan pertemuan-pertemuan dalam penyusunan RPDP dilakukan dalam rangka persiapan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPDP dan konsultasi rancangan RPDP kepada seluruh pemangku kepentingan di desa sebelum dilakukan pengesahan.

Review RPDP dimaksudkan untuk mensinkronkan RPDP dengan RPJM Des dan untuk mengakomodir kebutuhan mendesak. kriteria kebutuhan mendesak meliputi:

1. *Force majour* (keadaan kahar) yang ditetapkan oleh kepala daerah
2. Perubahan kondisi lingkungan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah

Sedangkan tahapan Review RPDP dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh kepala Desa/Lurah;
2. Peserta rapat terdiri dari perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Motivator Desa, tenaga pendamping dan ketua KMP;
3. Review RPDP dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion atau musyawarah desa; dan
4. Review RPDP ditetapkan melalui Perdes.

C. Pemilihan KMP Calon Penerima BLM

Calon penerima BLM PDPT adalah KMP yang memenuhi kriteria:

1. pengurus dan anggota bukan perangkat desa/kelurahan, PNS, TNI/Polri, dan PPTK;
2. pengurus dan anggota berdomisili di desa/kelurahan setempat, yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari kepala desa/lurah; dan
3. pengurus dan anggota berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang yang 60% di antaranya merupakan masyarakat hampir miskin

Selanjutnya KMP calon penerima BLM PDPT ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kabupaten/kota. Tahapan Penetapan KMP penerima BLM PDPT oleh dinas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. KMP Penerima BLM PDPT ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran setelah lolos verifikasi melalui SK Kepala Dinas sebagaimana Formulir 8;
2. KMP penerima BLM PDPT tahun sebelumnya dapat ditetapkan kembali melalui SK Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
3. SK KMP Penerima BLM PDPT berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,77 cm + Indent at: 3,41 cm

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,77 cm + Indent at: 3,41 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, Not Strikethrough

D. Peranserta Perempuan dalam kegiatan

Mendorong peranserta perempuan dalam kegiatan PDPT adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki harus dimasukkan dalam **perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan**, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan gender. Selain itu peningkatan peran serta perempuan juga bertujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh :

- a. Akses yang setara terhadap pembangunan
- b. Kesempatan berpartisipasi yang setara dalam pembangunan
- c. Mempunyai kontrol yang setara atas pembangunan
- d. Memperoleh manfaat yang setara dalam pembangunan

1. Peran Dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Dalam pelaksanaan PDPT tahun 2014 diperlukan kader pemberdaya masyarakat yang berfungsi aktif memfasilitasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu dalam review Rencana Pengembangan Desa Pesisir dan Rencana Kerja Kelompok, **harus** dihadiri **masyarakat rentan miskin** dan terdapat **partisipasi perempuan**.

2. Peran dalam Pelaksanaan

Perempuan dan laki-laki mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon KMP dan RKK, serta membantu kegiatan PDPT pada tingkat desa.

3. Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi

Perempuan dan laki-laki mempunyai kewenangan yang sama dalam memantau terhadap pelaksanaan kegiatan dan membuat pelaporan serta evaluasi terhadap pelaksanaan PDPT di desa.

Untuk mendorong peran serta perempuan yang lebih besar, diperlukan adanya strategi sebagai berikut:

1. 30% Tenaga Pendamping Desa (TPD)/Kader Desa adalah perempuan
2. Pembentukan KMP Khusus perempuan di setiap desa pelaksana sekurang-kurangnya 1 KMP

3. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan pada pertemuan perencanaan kegiatan tingkat desa
4. Melaksanakan kerurang-kurangnya 2 (dua) kali pertemuan khusus perempuan
5. Mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis perempuan

E. Menu Kegiatan

Prioritas pelaksanaan kegiatan PDPT adalah :(1) Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim berupa Penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana dan perubahan iklim, (2) Kegiatan Bina Sumber Daya berupa Peningkatan dan/atau Perbaikan Ekosistem Pesisir, (3) Kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur berupa Pembangunan dan/atau Perbaikan Lingkungan atau Infrastruktur, (4) Kegiatan Bina Usaha berupa Penyediaan Sarana Kegiatan Usaha, (5) Kegiatan Bina Sumber Daya Manusia, dan (6) Kegiatan Bina Kelembagaan.

1. Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim berupa penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana dan perubahan iklim merupakan usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Bantuan prasarana dan sarana siaga bencana dan perubahan iklim antara lain berupa:

a. Penyediaan fasilitas penyelamatan diri

Fasilitas penyelamatan diri, seperti rambu evakuasi dan *shelter* merupakan prasarana dan sarana siaga bencana atau perubahan iklim yang kebutuhannya disesuaikan dengan potensi bencana, morfologi (kondisi bentang alam), kondisi sosial, kondisi lingkungan, kondisi infrastruktur yang sudah ada, dan memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. *Shelter* berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana. *Shelter* dapat berbentuk bangunan, bukit buatan, atau bentuk lainnya. Ketentuan mengenai *shelter* mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, Italic

ketentuan lainnya. Adapun ketentuan mengenai rambu evakuasi mengacu pada Pedoman yang dibuat oleh Kementerian Ristek.

- b. Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau tanggul sungai di pesisir

Pemilihan sistem perlindungan pantai harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi dan karakteristik pantai. Perencanaan perlindungan pantai difasilitasi oleh tenaga pendamping. Untuk pemilihan bantuan ini aliran sungaip perlu dilakukan identifikasi aset yang terancam, termasuk infrastruktur, penentuan tujuan, desain struktur, dan penentuan penanganan struktural dan non-struktural.

- c. Penyediaan sarana informasi bencana

Penyediaan sarana informasi bencana antara lain berupa papan informasi bencana dan radio komunitas. Radio komunitas merupakan radio pemancar non komersial yang dikelola masyarakat di wilayah pesisir, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. Adapun spesifikasi radio pemancar sebagai berikut:

- 1) pemancar gelombang FM;
- 2) daya listrik maksimal 100 watt;
- 3) *bandwidth* maksimal 350 KHz;
- 4) *tinggi* antena maksimal 30 meter; dan
- 5) daya jangkauan siaran sejauh 6 km.

- d. Pembangunan/perbaikan/normalisasi drainase dalam penanggulangan banjir di luar kawasan konservasi

Drainase merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dalam pengelolaan banjir. Drainase secara konvensional hanya bertujuan untuk segera mengeringkan suatu wilayah dengan cara memindahkan air melalui saluran yang bermuara pada badan air sungai dan laut. Untuk menciptakan keseimbangan siklus air, maka perlu perencanaan drainase yang berwawasan lingkungan yaitu memakai resapan.

Pada perencanaan drainase untuk penanggulangan banjir perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data meliputi: Peta topografi, sistem penanganan drainase eksisting, tinggi genangan banjir, dan data curah hujan;
- 2) Perencanaan konstruksi drainase; dan
- 3) Pengendalian banjir alternatif antara lain dengan normalisasi saluran, pompa dan analisis pengaruh *backwater* air laut.

e. Pembangunan jalur evakuasi bencana

Pada pembangunan jalur evakuasi perlu diperhatikan hal-hal dalam menyusun dan merancang jalur evakuasi, meliputi:

- 1) Jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai. Prioritaskan bagi penduduk di kawasan dengan garis ketinggian 1-10 meter;
- 2) Jalur evakuasi disarankan tidak melintasi sungai atau jembatan;
- 3) Pembuatan jalur evakuasi paralel yang diprioritaskan pada daerah pantai yang terbuka tanpa pepohonan penutup atau tanpa batu karang maupun gumuk pasir; dan
- 4) Pembuatan jalur evakuasi sistim blok diperuntukan bagi daerah berpenduduk padat yang dibatasi oleh aliran sungai.

f. Penanaman vegetasi pantai, mangrove, dan terumbu karang.

Ekosistem vegetasi pantai, mangrove, dan terumbu karang merupakan pertahanan alami yang efektif mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat meminimalisir dampak terhadap abrasi pantai, tsunami, badai gelombang dan intrusi air laut.

2. Kegiatan Bina Sumberdaya

Kegiatan Bina Sumberdaya berupa peningkatan dan/atau perbaikan ekosistem pesisir dilaksanakan untuk menjamin kelestarian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut melalui pendekatan kearifan lokal. Bantuan untuk peningkatan dan/atau perbaikan ekosistem pesisir antara:

- a. Pengadaan dan penanaman bibit mangrove/ vegetasi pantai lainnya beserta penunjang kegiatan;
 - 1) pengadaan dan penanaman bibit disesuaikan dengan memperhatikan karakteristik fisik lingkungan pesisir, yaitu tanah/substrat, pasang surut, dan ombak, disarankan penanaman vegetasi pantai dan/atau mangrove agar memperhatikan pedoman penanaman vegetasi pantai dan/atau mangrove;
 - 2) penunjang kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:
 - a) alat pemecah ombak (APO), terbuat dari kayu/bambu, dapat diterapkan pada pesisir dengan kekuatan ombak yang besar dan dapat merusak pertumbuhan bibit tersebut; dan/atau
 - b) penyangga tanaman/ajir-ajir, terbuat dari kayu/bambu, digunakan untuk menyangga bibit.
- b. Rehabilitasi terumbu karang beserta penunjang kegiatan
Rehabilitasi terumbu karang dapat dilakukan melalui upaya transplantasi karang dan terumbu karang buatan (*artificial reef*) yang terbuat dari bambu atau beton. Rehabilitasi terumbu karang dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik fisik lingkungan pesisir dan laut, antara lain penetrasi sinar matahari, suhu air, arus, kualitas air, substrat, pasang surut, dan ombak. Disarankan dalam melakukan rehabilitasi terumbu karang agar memperhatikan pedoman rehabilitasi terumbu karang.
- c. Rehabilitasi lamun beserta penunjang kegiatan
Rehabilitasi lamun dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik fisik lingkungan pesisir, antara lain penetrasi

sinar matahari, suhu air, arus, kualitas air, substrat, pasang surut, dan ombak.

- d. Sarana pendukung pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam mendukung pengelolaan kawasan tersebut diperlukan sarana dan prasarana antara lain kegiatan ekowisata bahari, dan bangunan penunjang.

- e. Penyediaan sarana informasi

Penyediaan sarana informasi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keragaman, sebaran dan manfaat dari sumber daya pesisir yang ada serta upaya pelestarian yang dilakukan. Penyediaan sarana informasi dapat berupa pondok informasi atau bentuk lainnya.

3. Kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur

Kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur berupa pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur dilaksanakan untuk mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya. Bantuan pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur antara lain berupa:

- a. Sarana distribusi air bersih

Prasarana dan sarana air minum yang akan dibangun, dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ketersediaan dan kebutuhan akan sumber air baku, ketersediaan lahan, bahan, kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

Sistem penyediaan air minum didasarkan pada:

- 1) sumber air baku yang berupa mata air, air tanah, air permukaan, dan air hujan;
- 2) pengolahan air, yaitu pengolahan lengkap atau tidak lengkap, yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kualitas air baku; dan

- 3) sistem pendistribusian, yaitu gravitasi atau pemompaan.

Sistem distribusi berupa sambungan langsung ke rumah dan/atau kran umum.

b. Penyediaan listrik dan prasarana penerangan non-Listrik Tenaga Surya

Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PDPT merupakan jenis prasarana atau kegiatan bersifat umum/ kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum dan pembangkit listrik.

c. Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Beberapa jenis jembatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) jembatan beton;
- 2) jembatan gantung; dan
- 3) jembatan gelagar besi/jembatan besi.

Infrastruktur bangunan pelengkap dapat berupa:

- 1) gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jembatan/jalan;
- 2) penahan lereng/tebing jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke jembatan.

Penjelasan lebih detail sistem dan spesifikasi jalan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

d. Pembangunan/perbaikan tempat pembuangan sampah/pengolahan sampah

Data yang diperlukan dalam perencanaan pengolahan sampah yaitu :

peta penyebaran rumah;

- 1) luas daerah yang dikelola;
- 2) jumlah penduduk;
- 3) jumlah rumah;
- 4) besaran timbunan sampah per hari;
- 5) kondisi jalan;
- 6) kondisi topografi dan lingkungan;
- 7) ketersediaan lahan untuk lokasi TPS dan daur ulang sampah skala lingkungan; dan
- 8) karakteristik sampah.

Ketentuan lebih rinci mengenai pengelolaan persampahan mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242:2008 Pengelolaan sampah di permukiman.

e. Pembangunan/perbaikan drainase (di luar Kawasan Konservasi Perairan)

Kegiatan drainase meliputi saluran pembuangan air hujan/buangan di permukiman, termasuk sumur resapan. Ketentuan umum pembangunan drainase permukiman adalah:

- 1) harus terintegrasi dengan sistem/jaringan drainase yang sudah ada atau harus sampai pada tempat pembuangan air (saluran drainase/sungai/ laut);
- 2) Diusahakan menghindari perlintasan dengan bangunan yang telah ada, bila melewati perlintasan maka desain dan pelaksanaannya wajib mendapat persetujuan dari instansi pengelola bangunan tersebut, misalnya melintasi rumah penduduk/bangunan umum/jaringan/ bangunan listrik, telepon;
- 3) Prioritas pembangunan drainase dengan urutan: perbaikan/peningkatan drainase lama karena kapasitas/ fungsinya sudah berkurang dan pembangunan baru; dan
- 4) Air hujan yang masuk kesaluran air hujan adalah air hujan yang tidak tercemar dan bukan air limbah.

Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan (bukan air limbah) ke dalam tanah. Air hujan yang diresapkan berasal dari bidang tanah, atap bangunan, dan permukaan tanah yang dikedapkan/perkeras untuk menjaga keseimbangan sistem tata air dilingkungan dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang.

- f. Pembangunan/perbaikan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK)

Pembangunan prasarana MCK perlu memperhatikan:

- 1) ketersediaan akses dan lokasi;
- 2) jumlah pengguna;
- 3) pembuangan limbah dari MCK melalui unit pengolah (*septic tank* dan peresapan) agar tidak mencemari lingkungan;
- 4) ketersediaan air bersih;
- 5) sirkulasi udara dalam ruang MCK; dan
- 6) pemilihan bentuk bangunan dan material memperhatikan kondisi sosial dan budaya lokal.

- g. Pembangunan/perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti pembangunan/pengembangan taman/lapangan olah raga/lahan parkir/taman bermain/kawasan hijau/resapan, serta pembangunan/perbaikan rumah.

Pembangunan/perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah:

- 1) Pembangunan/pengembangan taman/ lapangan olah raga/ lahan parkir/ taman bermain/ kawasan hijau /resapan.

Kegiatan prioritas pembangunan fasilitas umum ini dilakukan dengan urutan: perbaikan/peningkatan kapasitas/fungsinya yang berkurang dan pembangunan baru.

- 2) Pembangunan/perbaikan rumah

Kegiatan perumahan/permukiman yang dibangun dalam PDPT merupakan jenis kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan dibuat dengan konstruksi tahan bencana/perubahan iklim, misalnya perbaikan dan pembangunan rumah (renovasi rumah).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan/perbaikan rumah mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.44/KP3K/XII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana di Wilayah Pesisir.

4. Kegiatan Bina Usaha

Kegiatan Bina Usaha berupa penyediaan sarana kegiatan usaha dengan tujuan:

- 1) mengangkat potensi unggulan lokal; dan
 - 2) mendukung dan menggerakkan ekonomi serta menjamin kegiatan usaha di tingkat masyarakat. Kegiatan tersebut berupa sarana mata pencaharian alternatif dan sarana penunjang usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- a. Bantuan sarana mata pencaharian alternatif antara lain berupa:
- 1) Kerajinan hasil laut
Kegiatan kerajinan ini difokuskan kepada kerajinan yang menggunakan bahan baku hasil-hasil laut yang meningkatkan nilai tambah, seperti kulit ikan dan kerang-kerangan.
 - 2) Daur ulang limbah
Kegiatan ini difokuskan kepada pemanfaatan buangan limbah baik organik maupun anorganik yang meningkatkan nilai tambah.
 - 3) Perahu wisata
Bantuan ini dapat dipilih untuk desa yang telah dicanangkan sebagai desa wisata. Desain perahu harus

Comment [G8]: Diganti Unggulan lokal

nyaman dan aman bagi wisatawan, dilengkapi dengan alat keselamatan seperti *life jacket*, dll. Adapun jenis perahu wisata yaitu:

- a) perahu wisata perairan, dapat digunakan untuk kegiatan memancing dan untuk olah raga air, seperti penarik banana boat, ski air, dan *para sailing*. Material terbuat dari fiber/kayu, mesin kapal setara 5 s/d 30 PK;
- b) *glass bottom boat*, perahu yang menggunakan dasar dari kaca dimanfaatkan khusus untuk daerah dengan potensi terumbu karang yang baik. Material terbuat dari fiber, mesin kapal setara 5 s/d 30 PK, kapasitas penumpang maksimal 10 orang; dan/atau
- c) banana boat, digunakan untuk kegiatan olah raga air yang harus ditarik oleh perahu wisata perairan. Material terbuat dari karet, panjang: 5 – 6 m, kapasitas penumpang muatan maksimal 5 orang atau 500 kg.

4) Alat selam

Diberikan khusus untuk mendukung wisata bawah laut terutama pada lokasi yang memiliki potensi terumbu karang. Peralatan-peralatan yang dapat diberikan antara lain:

- a) masker;
- b) snorkel;
- c) fin;
- d) wet suit;
- e) jaket pelampung;
- f) scuba set;
- g) sabuk pemberat;
- h) tabung udara; dan/atau
- i) kompresor khusus selam.

- b. Kegiatan usaha pendukung industrialisasi kelautan skala kecil, seperti pengembangan bioteknologi kelautan (a.l. penyediaan bahan baku untuk pengembangan usaha berbasis bioteknologi diantaranya dengan memanfaatkan invertebrata laut untuk tujuan penyediaan bahan baku kosmetik, farmasi, rumput laut non pangan dan mikroalga untuk bioenergi), *Virgin Coconut Oil*, minyak nilam, dan air bersih/minum.

Comment [G9]: tambahan

Kegiatan pada komponen PDPT tidak terbatas pada contoh di atas. Pada pelaksanaannya kegiatan disesuaikan dengan prioritas seperti yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa. Teknik pelaksanaan pemanfaatan BLM PDPT mengikuti panduan pada Lampiran VII.

5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dilakukan di tiap-tiap desa melalui kegiatan antara lain bimbingan teknis yang dilakukan oleh fasilitator dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah KMP penerima BLM.

Peningkatan kapasitas masyarakat desa pesisir ini merupakan bagian kegiatan Bina Manusia dan Bina Kelembagaan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat serta pertemuan lainnya dengan menggunakan anggaran non-BLM. Adapun pelatihan – pelatihan yang dilakukan antara lain:

Comment [G10]: dihilangkan

1. Pelatihan kelembagaan dapat berupa pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan Koperasi, pengelolaan organisasi penanggulangan kebencanaan dan lain-lain;
2. Pelatihan kewirausahaan dapat berupa pelatihan mata pencaharian alternatif, pemasaran dan lain-lain;
3. Pelatihan kesiapsiagaan bencana dapat berupa pelatihan pengenalan bencana, gladi bencana, pembuatan peta resiko bencana dan lain-lain;
4. Pelatihan dinamika kelompok;

5. Pelatihan administrasi/manajemen kelompok masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan keuangan.

Materi pelatihan yang terkait dengan kelautan dan perikanan diprioritaskan diberikan oleh penyuluh perikanan.

1. Kegiatan Bina Manusia

Khusus untuk bina manusia dan bina kelembagaan, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, mentoring dan pembekalan. Materi dan kebutuhan serta strategi kegiatan peningkatan kapasitas dirancang oleh tenaga pendamping berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh tenaga pendamping bersama-sama dengan tim Teknis dan tenaga penyuluh.

Comment [G11]: Dipindah ke bawah di poin E

2. Kegiatan Bina Kelembagaan

Kegiatan bina kelembagaan merupakan tahapan lanjut PDPT melalui pembentukan institusi desa guna pengembangan kegiatan oleh KMP-KMP yang telah terbentuk. Bina kelembagaan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program PDPT di masa yang akan datang. Institusi desa yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk melakukan korporatisasi usaha KMP yang telah terbentuk sekaligus bermanfaat untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta karena BUMDes merupakan institusi yang berbadan hukum di tingkat desa. BUMDes selain berperan sebagai payung hukum usaha KMP juga dapat menjadi lembaga simpan pinjam untuk modal usaha KMP serta mempunyai kewajiban kontribusi kepada kas desa.

F. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok

Rencana Kerja Kelompok (RKK) harus mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir untuk beberapa kegiatan

sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai dengan skala prioritas dalam [RPDP](#).

Penyusunan RKK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. setelah KMP ditetapkan dengan keputusan kepala dinas, selanjutnya KMP menyusun RKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang tertuang dalam rencana pengembangan desa;
- b. RKK disusun oleh KMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir dibantu oleh Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping, sesuai dengan Rencana Pengembangan Desa; dan
- c. RKK dan dokumen administrasi pendukung lainnya diusulkan oleh KMP melalui Tenaga Pendamping kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi. Tim Teknis yang melakukan verifikasi adalah Sub Tim Teknis.

1. Dokumen administrasi yang disiapkan oleh KMP terdiri atas:

- a. Data KMP meliputi nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, umur, jenis kelamin dan alamat yang dilengkapi dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari Camat;
- b. Nomor rekening KMP atas nama kelompok;
- c. Hasil Identifikasi dan Seleksi KMP Calon Penerima BLM PDPT;
- d. Berita Acara Hasil Verifikasi KMP Calon Penerima BLM PDPT; dan
- e. Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran dan Pemanfaatan BLM PDPT bermaterai secukupnya.

2. Verifikasi Proposal dan Dokumen KMP serta Penetapan KMP

- a. Seleksi dan verifikasi proposal RKK beserta dokumen administrasi KMP dilakukan oleh Tim Teknis sebagai berikut:

- 1) Proposal RKK ditandatangani oleh Ketua KMP dan dilengkapi dengan dokumen administrasi diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi;
- 2) Hasil verifikasi RKK dan dokumen administrasi pendukung dari Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas selaku KPA untuk proses pencairan BLM; dan
- 3) Proposal RKK dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pemberdayaan Desa atau Tenaga Pendamping untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh KMP.

G. Bantuan Langsung Masyarakat

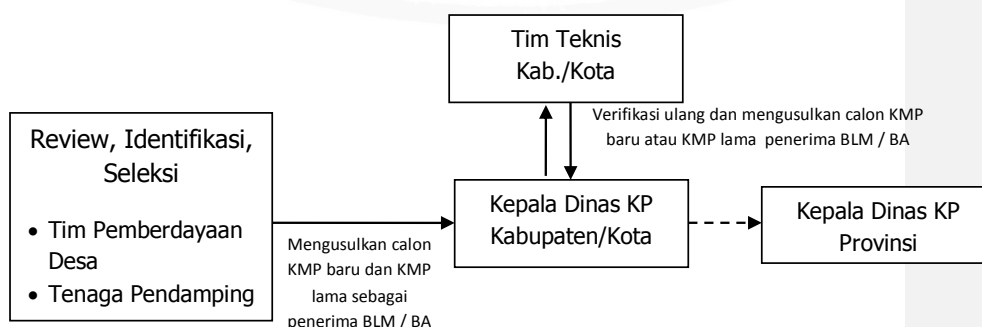
BLM PDPT merupakan stimulan program yang terdiri atas komponen:

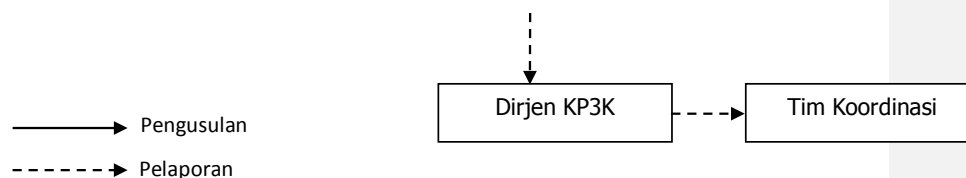
Comment [G12]: diganti atas

1. Penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana atau perubahan iklim;
2. Peningkatan dan/atau perbaikan ekosistem pesisir;
3. Pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur; dan
4. Penyediaan sarana kegiatan usaha sekunder.

H. Tahapan Pengusulan Penerima

Tahapan pengusulan KMP calon penerima BLM PDPT dapat dilihat sebagaimana skema di bawah ini:





Gambar 6. Tahap pengusulan KMP calon penerima BLM PDPT

Tahapan pengusulan calon penerima BLM PDPT dilakukan secara berjenjang melalui tahapan seperti dibawah ini:

1. Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping, bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kinerja penerima BLM lama, dan/atau melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima BLM PDPT baru;
2. Hasil evaluasi kinerja penerima BLM lama dan/atau identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima BLM PDPT baru selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota;
3. Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota melakukan review hasil evaluasi kinerja penerima BLM lama dan/atau identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima BLM PDPT baru untuk kemudian menetapkan KMP dimaksud setelah mendapatkan verifikasi ulang dari Tim Teknis;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Keputusan Penetapan Penerima BLM PDPT kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (koordinator Pokja PDPT) dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi;
5. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku penanggung jawab kegiatan melaporkan penetapan penerima BLM PDPT kepada Tim Koordinasi.

I. Prosedur Penyaluran BLM

Penyaluran dana BLM PDPT dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening KMP, melalui tahapan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KMP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;

2. Surat Pemerintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran :
 - a. Keputusan kepala dinas kabupaten/kota tentang penetapan KMP penerima BLM;
 - b. Data KMP meliputi:
 - 1) nama ketua;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara;
 - 4) anggota;
 - 5) nomor telepon/telepon genggam
 - 6) umur;
 - 7) jenis kelamin;
 - 8) alamat;
 - 9) KTP;
 - 10) Kartu Keluarga; dan
 - 11) Surat Keterangan Domisili dari camat.
 - c. Nomor Rekening bank aktif atas nama KMP;
 - d. Hasil Identifikasi KMP Penerima BLM PDPT;
 - e. Hasil Seleksi KMP Penerima BLM PDPT;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi KMP Penerima BLM PDPT;
 - g. Kuitansi yang sudah ditandatangani Ketua KMP dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); dan
 - h. Surat Perjanjian Kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan KMP yang bermaterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah).
3. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KMP pada unit bank terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KMP yang diketahui dan didampingi oleh Tenaga Pendamping;

5. KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota melalui Tim Pemberdayaan Desa;
6. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM PDPT kepada Pokja PDPT Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi; dan
7. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku Koordinator PDPT melaporkan penyaluran BLM PDPT kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri KP.

J. Proses Penyaluran BLM PDPT

Prosedur Penyaluran BLM PDPT adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KMP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan format seperti Formulir 20.
3. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KMP pada unit bank terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KMP yang diketahui dan didampingi oleh Tenaga Pendamping.
5. KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota.
6. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM PDPT kepada Pokja PDPT Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
7. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku Koordinator PDPT melaporkan penyaluran BLM PDPT kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri KP.

K. Pemanfaatan Dana BLM PDPT

Dana BLM PDPT yang disalurkan kepada KMP dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus KMP sesuai dengan RKK. Apabila terjadi perubahan kegiatan setelah BLM dicairkan maka KMP menyusun ulang RKK dengan melampirkan alasan perubahan kegiatan, usulan RKK diajukan sesuai prosedur penyaluran BLM PDPT dan selanjutnya dibuat addendum perjanjian pemanfaatan dana BLM dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, —Pemanfaatan dana BLM PDPT dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Pengurus KMP menginformasikan kepada seluruh anggota KMP bahwa dana PDPT telah masuk ke rekening KMP;
2. Pengurus dan seluruh anggota KMP menentukan jadwal penarikan sesuai dengan kesepakatan Rapat Anggota;
3. Penarikan atau pencairan dana BLM PDPT dari Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati Rapat Anggota;
4. Formulir penarikan dana BLM PDPT harus ditandatangani oleh ketua, Bendahara, dan/atau Sekretaris KMP serta dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota;
5. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan, dibukukan, dan bukti transaksi harus disimpan oleh bendahara KMP; dan
- 5-6. [Format berita acara perubahan RKK pada lampiran.](#)

L. Lokakarya PDPT [Tingkat Kabupaten/Kota](#)

Lokakarya PDPT tingkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk memaparkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang serta mendorong sinergitas lingkup kabupaten/kota dalam upaya pengembangan desa pesisir tangguh.

Materi yang akan disampaikan didalam lokakarya tingkat Kabupaten/Kota:

1. Hasil – hasil pelaksanaan PDPT di masing – masing desa;
2. Hasil evaluasi dari dinas kabupaten/kota dan Propinsi yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
3. Masukan dan arahan tentang pelaksanaan kegiatan PDPT yang disampaikan oleh Ditjen KP3K – KKP.

Pada pelaksanaan Lokakarya PDPT tingkat Kabupaten/Kota dimana masing-masing SKPD/stakeholder terkait dapat menyampaikan program yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka sinergitas program.

Pelaksanaan Lokakarya PDPT di tingkat Kabupaten/Kota melibatkan Pemda kabupaten/kota, DKP, SKPD terkait, Tim Teknis, Camat, Perangkat Desa/Kelurahan, LSM/NGO, serta pemangku kepentingan lainnya.

M. Kondisi Force Majeur (Keadaan Kahar)

Kondisi force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak pelaksana kegiatan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, kekeringan, angin topan dan tanah longsor), bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit) dan bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror). Dalam kondisi force majeure ini dapat dilakukan perubahan RPDP dan RKK yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan keadaan force majeure oleh Kepala Daerah;
2. Kepala dinas membuat berita acara perubahan RPDP dan RKK;
3. Perubahan RPDP ditetapkan melalui peraturan desa; dan
4. Perubahan RKK ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku KPA.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

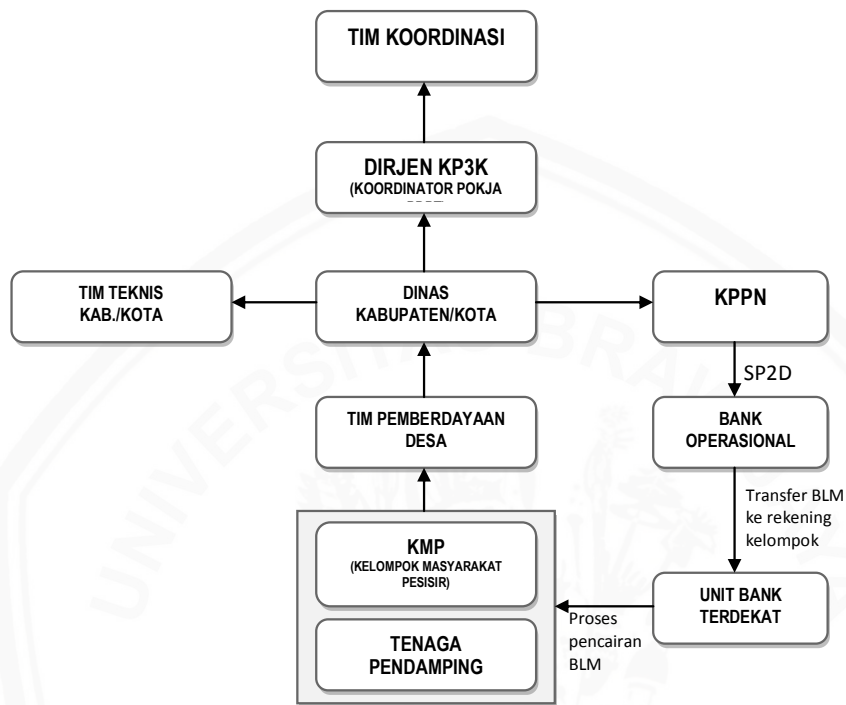
Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,14 cm + Indent at: 2,77 cm, Tab stops: 0,75 cm, Left

Formatted: Normal, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm

Diagram Penyaluran BLM PDPT :



Gambar 7. Prosedur Penyaluran BLM PDPT

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di tingkat Pusat dilakukan oleh Pokja PDPT Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, sedangkan di tingkat daerah dapat dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

A. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan PDPT yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (*input*), pelaksanaan (proses), keluaran (*output*), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari dinas kabupaten/kota, dinas provinsi dan Ditjen KP3K sesuai dengan kewenangannya.

1. Monitoring Pra Kegiatan

Sebelum kegiatan PDPT tahun 2014 dimulai, setiap kabupaten kota agar melakukan monitoring atau pendataan awal tentang ketangguhan desa pesisir. Selanjutnya hasil monitoring tersebut akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja outcome yaitu dengan membandingkan tingkat ketangguhan sebelum dan sesudah mendapatkan sentuhan PDPT 2014.

2. Monitoring Pelaksanaan

Pada tahun berjalan kabupaten/kota melakukan monitoring secara mandiri terhadap kegiatan dan komponen kegiatan yang ada dalam RKAKL agar berjalan sesuai target waktu dan indikator *output* yang sudah direncanakan. Hasil monitoring ini agar disampaikan kepada dinas kelautan dan perikanan provinsi dan Ditjen KP3K untuk dikompilasi menjadi data nasional dan umpan balik solusi permasalahan yang diperlukan. Selanjutnya Ditjen KP3K juga akan melakukan monitoring ke daerah untuk pengendalian dan pembinaan kegiatan.

3. Monitoring Pasca Kegiatan

Setelah tahun anggaran 2014 berakhir, dinas kabupaten/kota segera melakukan monitoring ke lokasi untuk melihat capaian indikator *output* dan indikator *outcome* sebagaimana ditargetkan pada Bab I pedoman teknis ini. Selanjutnya kabupaten/kota perlu melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada KMP selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk menjamin keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan KMP sebagaimana diamanatkan dalam program PNPM.

Ketentuan mengenai monitoring pasca kegiatan PDPT dapat dilihat pada Lampiran VI tentang Panduan Monitoring PDPT.

4. Monitoring Indikator Utama Kegiatan PNPM

Monitoring Indikator Utama Kegiatan PNPM dilaksanakan terhadap 19 indikator kegiatan utama yang ditetapkan sekretariat PNPM Mandiri sebagai target yang harus dicapai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri termasuk didalamnya PDPT.

B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan Satker

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, setiap satker kabupaten/kota diwajibkan menyampaikan laporan.

Terkait dengan pelaksanaan PDPT, terdapat 4 (empat) jenis laporan yang secara rutin harus dipersiapkan secara rutin oleh masing-masing satker, yaitu:

- a. Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL Form A;
- b. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari 1) Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan 2) Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam pelaksanaannya Laporan SAK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007. Laporan ini agar disampaikan kepada Ditjen KP3K pada tanggal 10 setiap bulan dan triwulanan.
- c. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan; dan
- d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 1) Pencapaian Target Triwulan I, II, III, dan IV

Satker dinas kabupaten/kota pelaksana PDPT wajib membuat laporan triwulanan pelaksanaan DIPA/RKAKL dengan menggunakan Formulir-A. Format Form-A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagaimana terlampir. Laporan triwulan memuat antara lain rincian jenis belanja, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran DIPA/PO-DIPA (RKAKL). Disamping itu juga dilaporkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan mengisi kolom permasalahan. Apabila terdapat perbedaan yang

signifikan antara target dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dengan realisasi baik fisik maupun keuangan maka wajib dijelaskan permasalahannya dan upaya menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Laporan triwulan pelaksanaan DIPA/RKAKL (Form A) ini disampaikan ke Ditjen KP3K setiap triwulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima), setelah triwulan berakhir.

2) Pencapaian serapan anggaran dan output

Pencapaian serapan anggaran dan output dilakukan secara real time setiap ada penyetoran SPM dan terbitnya SP2D

3) Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan

4) Laporan perkembangan TL-LHA/P

Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan (TL LHA/LHP) adalah laporan yang harus dibuat oleh KPA yang berisikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan auditor pada Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal KKP. Dalam Pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 disebutkan bahwa setiap pejabat yang diperiksa/satker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHA/LHP diterima. Apabila ada hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, agar diinformasikan dengan obyektif, lengkap serta penyebab dari hambatan tersebut. Laporan TL LHA/LHP agar melampirkan:

- a) bukti setor uang ke kas Negara;
- b) surat keputusan pejabat yang berwenang;
- c) berita acara yang terkait dengan TL LHA/LHP;

- d) surat/nota/dinas/memorandum perihal instruksi/perintah, teguran, koordinasi, usulan, laporan dsb yang terkait dengan TL LHA/LHP;
- e) foto-foto pendukung TL LHA/LHP; dan
- f) dokumen lain yang terkait.

Berkas TL LHA/LHP yang telah ada harus segera dikirimkan kepada:

- a) instansi pengawas (BPK/BPKP/ITJEN) berupa bukti asli; dan
- b) Dirjen KP3K - cq. Sekretariat Ditjen KP3K dengan bukti fotocopi.

2. Laporan Tim Pemberdayaan Desa

Tim Pemberdayaan desa membuat laporan bulannan terkait pelaksanaan PDPT sebagaimana format pada Formulir 2.d yang ditujukan kepada kepala dinas kabupaten/kota dan ditembuskan ke direktorat pesisir dan lautan.

3. Laporan Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping membuat laporan bulannan terkait pelaksanaan PDPT sebagaimana format pada Formulir 2.b yang ditujukan kepada kepala dinas kabupaten/kota dan ditembuskan ke direktorat pesisir dan lautan.

4. Pelaksana Pelaporan

Laporan pelaksanaan dilakukan oleh:

- a. Tim Pemberdayaan Desa menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tanggal 10 setiap bulan sampai masa kerja selesai kepada kepala dinas kabupaten/kota;
- b. Tenaga Pendamping menyampaikan laporan setiap bulan kepada kepala dinas kabupaten/kota;
- c. KMP didampingi Tenaga Pendamping membuat Laporan Pemanfaatan BLM PDPT kepada kepala dinas kabupaten/kota;

~~d. Konsultan menyampaikan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas kabupaten/kota dan ditembuskan ke Dinas Propinsi;~~

e.d. Dinas kabupaten/kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PDPT setiap bulan kepada Direktorat Jenderal KP3K dengan tembusan ~~D~~dinas ~~P~~propinsi sebagaimana format pada Formulir 2.a; dan

~~f.e.~~ Direktur Jenderal KP3K selaku Koordinator Pokja PDPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan PDPT setiap triwulan, semester, dan akhir tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

C. Evaluasi

Evaluasi atau penilaian dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja masukan (*input*), pelaksanaan (proses) dan keluaran (*output*) dari hasil monitoring. Evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Penilaian ketangguhan desa pesisir yang mengacu pada Panduan Penilaian Ketangguhan Desa Pesisir dalam **Lampiran III**; dan
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan Program PDPT, untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi acuan bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang dapat terjadi pada pelaksanaan Program PDPT selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Ditjen KP3K.

D. Pengaduan Masyarakat (*complain hadling unit*)

Dalam rangka transparansi pelaksanaan PDPT Tahun 2014, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada kepala dinas kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, atau dapat ditujukan langsung kepada Ditjen KP3K;
2. Kepala dinas kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, dan Ditjen KP3K akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan/atau
3. Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan, KKP menyediakan layanan pengaduan (*complain and handling unit*) yang dialamatkan kepada Tim Penanganan Pengaduan KKP yang berada pada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal, KKP, dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait.

Alamat pengaduan masyarakat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan ke:

- a. surat kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, c.q. Tim Pelayanan dan Pengananan Pengaduan Masyarakat dengan alamat Gedung Mina Bahari III – Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110;
- b. surat elektronik (e-mail) ditujukan ke sekretariat PDPT melalui **sekretariatPDPT@yahoo.com**; dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui **monevkp3k@yahoo.com**;
- c. Telepon / Faximile Sekretariat PDPT: (021) 3522059 serta dinas yang membidangi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat; dan
- d. Tim Penanganan Pengaduan KKP yang berada pada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110 dan/atau melalui website: **<http://www.itjen.kkp.go.id/layanan-masyarakat/pengaduan.html>** dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait.

Field Code Changed



BAB VII

KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Model PDPT adalah terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Kegiatan bina kelembagaan merupakan tahapan lanjut PDPT melalui pemberdayaan pemerintah desa guna pengembangan kegiatan oleh KMP-KMP yang telah terbentuk. Bina kelembagaan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program PDPT di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2014 ini, terutama untuk lokasi-lokasi kegiatan yang telah memasuki tahun ke-3 untuk lebih memprioritaskan keberlanjutan PDPT dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kegiatan kab./ kota dan provinsi yang dilakukan antara lain:

- a. Tim teknis kabupaten/kota harus mempunyai komitmen melaksanakan perencanaan yang ada di RPDP; dan
 - b. Dinas KP provinsi memprioritaskan kegiatan di lokasi PDPT sesuai RPDP dengan melibatkan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Peran serta aktif mitra bahari, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan media masa;
3. Penguatan kelembagaan desa :
 - a. Hasil review RPDP ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - b. Pembentukan badan usaha unit desa atau koperasi untuk usaha-usaha dari kegiatan Bina Usaha.
 - c. Pembentukan kelompok-kelompok siaga bencana dan perubahan iklim, dan kelompok pemerhati lingkungan hidup, dan lembaga kemasyarakatan / keswadayaan masyarakat lainnya yang dibentuk secara partisipatif dan inklusif.
4. Peningkatan peran aktif kelembagaan desa dalam keberlanjutan program PDPT.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan PDPT. Keberhasilan PDPT sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup wilayah pesisir.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun untuk memberi arahan tertulis dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BLM subbidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Tahun 2014.

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,**

SUDIRMAN SAAD

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Khoirul Ikhwan
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 1 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : RT 9 RW 3 Dusun Judeg Desa Tlogorejo Kecamatan
Pagak Kabupaten Malang
Telepon : 087859775714
E-mail : khoirulikhwan212@gmail.com
Hobby : Sepakbola

RIWAYAT PENDIDIKAN

- (2005) Lulus SDN TLOGOREJO 1 KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
- (2008) Lulus SMP PGRI 3 PAGAK KABUPATEN MALANG
- (2011) Lulus SMA JENDERAL SUDIRMAN KALIPARE KABUPATEN MALANG
- (2018) Lulus FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGALAMAN KEGIATAN

- Komite Divisi Mentoring Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor